



**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021**

SKRIPSI

Oleh
Ari Kusaimi
160810101009

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Ari Kusaimi

160810101009

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2022

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya dan penuh rasa syukur yang saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Sarmiah dan Bapak Sapari yang senantiasa tulus memberikan doa dan dukungan dalam setiap perjalanan saya dalam menempuh pendidikan mulai dari lahir hingga saat ini, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan, serta pendidikan moral yang telah ditunjukkan dan diajarkan kepada saya sejak kecil;
2. Seluruh keluarga besar baik dari keluarga ibu saya maupun keluarga dari bapak saya yang telah memberikan segala dukungan dan kasih sayang kepada saya hingga saya berhasil meraih keberhasilan dan kesuksesan;
3. Guru-guruku tersayang mulai dari guru pendidikan formal, nonformal dan informal terhormat, yang telah memberikan ketulusan hati untuk membimbing, memberi ilmu dan kesabaran dengan penuh keikhlasan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Barangsiapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barangsiapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu”

(Imam Syafi’i)

“Jangan melihat keluar. Melihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu”

(Jalaludin Rumi)

“Jika kita menanam padi maka akan tumbuh padi dan rumput. Jika kita menanam kebaikan, maka akan timbul kebaikan dan keburukan”

(Adhitya Wardhono)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Kusaimi

NIM : 160810101009

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2014 - 2021” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Ari Kusaimi

NIM 160810101009

SKRIPSI

**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021**

Oleh
Ari Kusaimi
NIM 160810101009

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI
PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021

Nama Mahasiswa : Ari Kusaimi

NIM : 160810101009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsetrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 13 September 2022

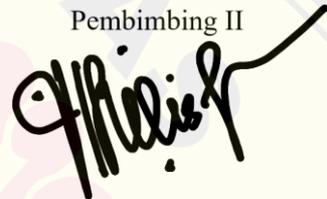
Pembimbing I



Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

NIP. 196101221987022002

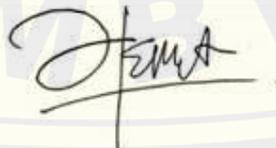
Pembimbing II



Dr. Lilis Yulianti, S.E., M.Si.

NIP. 196907181995122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1
Ekonomi Pembangunan



Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P., CPHCM.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

DI PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ari Kusaimi

NIM : 160810101009

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

30 September 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. ()
NIP. 195812061986031003
2. Sekretaris : Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E. ()
NIP. 197806162003122001
3. Anggota : Dr. Siti Komariyah., S.E., M.Si. ()
NIP. 197106102001122002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6
warna

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA.
NIP. 196610201990022001

**DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PULAU JAWA TAHUN 2014 - 2021**

Ari Kusaimi

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Pulau Jawa merupakan pulau terbesar dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang besar akan berakibat pada timbulnya permasalahan dan hambatan dalam upaya pembangunan yang dilakukan, karena jumlah penduduk yang besar tersebut menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja. Dalam penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh investasi, upah, kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di Pulau Jawa. Metode yang digunakan yakni *panel least square* (PLS). Hasil menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi secara signifikan oleh nilai investasi dan upah. Besarnya nilai investasi dan kenaikan upah di Pulau Jawa memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja secara simultan dan masif. Hasil ini merekomendasikan bawah perlu adanya penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah untuk meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada stabilitas perekonomian.

Kata kunci: PTK, Investasi, Upah, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, *panel least square* (PLS)

**DETERMINANTS OF LABOR ABSORPTION
IN JAVA ISLAND 2014 - 2021**

Ari Kusaimi

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

Java Island is the largest island with the highest population density in Indonesia. Large population growth will result in the emergence of problems and obstacles in the development efforts undertaken, because the large population causes a high number of the workforce. This study aims to examine the effect of investment, wages, quality of education and economic growth on labor absorption (PTK) in Java. The method used is the panel least squares (PLS). The results show that employment is significantly influenced by the value of investment and wages. The magnitude of the investment value and the increase in wages on the island of Java affect the level of absorption of labor simultaneously and massively. These results recommend that there is a need for policy alignment carried out by the central government to the regions to increase labor absorption so that people's welfare can be achieved which has an impact on economic stability.

Keywords: *PTK, Investment, Wage, Education, Economic Growth, panel least squares (PLS)*

RINGKASAN

Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021;
Ari Kusaimi; 160810101009; 2022; 108 halaman; Program Studi Ekonomi
Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jember.

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam pembangunan nasional suatu bangsa yang merupakan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam belum tentu mampu mengembangkan perekonomiannya jika tidak di dukung oleh sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, namun di sisi lain juga akan berakibat buruk jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari masalah-masalah yang berkaitan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah pesatnya jumlah peningkatan angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2035 mencatat pada Agustus 2019 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,67 juta jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 197,91 juta jiwa, bertambah 1,61% dibandingkan keadaan Agustus 2018 sebesar 194,78 juta jiwa. Pulau Jawa merupakan Pulau terbesar dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Diperkirakan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2019 mencapai 150,4 juta jiwa atau setara dengan 56% penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan potensi tenaga kerja yang besar bagi pembangunan. Namun disisi lain, pertumbuhan penduduk yang besar akan berakibat pada timbulnya permasalahan dan hambatan dalam upaya pembangunan yang dilakukan, karena jumlah

penduduk yang besar tersebut menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja. Pulau Jawa sendiri merupakan pulau dengan pusat perekonomian terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Pulau Jawa terdiri dari enam Provinsi. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh nilai investasi, tingkat upah, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Dimana data tersebut diperoleh dari dokumentasi suatu pihak instansi yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Bentuk data yang digunakan adalah *panel data* dimana dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2021 dengan objek penelitian yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang datanya diambil secara tahunan. Secara luas penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis kuantitatif. Metode *Panel Least Square* (PLS) digunakan untuk melihat turunan atau pengaruh investasi, tingkat upah, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Metode deskriptif kuantitatif menjelaskan bagaimana tingkat dari investasi, tingkat upah, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.

Hasil menunjukkan bahwa dampak dari tingginya aliran modal ke dalam suatu wilayah yakni terbentuknya lapangan kerja baru dan membuka pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan investasi yang beragam membentuk ekosistem ekonomi baru yang lebih maju dan terbuka sehingga penyerapan tenaga kerja lebih beragam. Kebijakan pemerintah pusat yang di interpretasikan terhadap kemudahan investasi melalui paket kebijakan ekonomi yang mendukung terbukanya investasi dan kemudahan dalam melakukan perizinan. Investasi yang selalu diharapkan di setiap daerah merupakan investasi yang berbentuk padat karya. Investasi pada sektor padat karya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menimbulkan kesejahteraan pada masyarakat dan berujung pada stabilitas

perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada setiap tahun mengalami kenaikan masih kurang dalam mendorong penyerapan tenaga kerja yang berada di pulau jawa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan terbukanya sektor industri yang nantinya membuka lapangan kerja dan penyerap tenaga kerja (Pujoalwanto, 2014). Merujuk pada konsep tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif.

Tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah dan pengaruh lingkungan sosial budaya yang masih kuat berdampak pada masyarakat yang masih acuh terhadap pentingnya pendidikan formal atau non formal. Pulau jawa yang merupakan pulau dengan tingkat penduduk tertinggi di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang kurang terutama pendidikan dasar. Faktor utama tidak meratanya pendidikan adalah besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh seseorang individu untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Fattah, 2008). Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berakibat pada penyerapan tenaga kerja yang berada di lima provinsi pulau jawa. Kecenderungan besarnya tenaga kerja yang berada di pulau jawa yang masih berada pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) sehingga penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan di pulau jawa terpenuhi. Indikator yang memperlihatkan bahwa pengaruh upah signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja adalah bertambahnya penawaran tenaga kerja yang berada di pasar tenaga kerja menyebabkan perusahaan menentukan upah minimum rendah untuk menyerap tenaga kerja.

Melimpahnya penawaran kerja yang terjadi di pulau jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia berdampak pada turunnya upah minimum yang ditetapkan oleh perusahaan (Sulistiawati, 2012). Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan untuk upah harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi. Pengenaan upah minimum yang telah dilakukan oleh pemerintah harus lebih mendorong pada perusahaan untuk membuka pekerjaan yang lebih banyak sehingga penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Disisi lain, kebijakan

pemberian pajak yang terlalu tinggi membuat perusahaan tidak membuka pekerjaan baru sehingga penyerapan tenaga kerja terganggu.

Dengan hasil penelitian ini dihasilkan saran Penyelarasan tujuan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk memudahkan masuknya investasi ke dalam suatu daerah. Kemudahan investasi, kepastian hukum dan stabilitas ekonomi perlu dijaga agar investasi yang sudah masuk tidak kembali keluar. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam memperoleh pekerjaan semakin mudah. bahwa tenaga kerja mampu meningkatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan soft skill serta pelatihan-pelatihan khusus yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Tenaga kerja diharapkan mampu berinovasi dan memiliki wawasan luas yang nantinya berguna dalam memperoleh pekerjaan. Kebijakan pemerintah dalam menentukan tingkat upah bagi pekerja harus sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Bertambahnya tingkat upah setiap tahun mampu di elaborasi oleh tenaga kerja untuk meningkatkan skil dan pengetahuan sehingga produktivitas perusahaan bertambah.

PRAKATA

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang mana atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-nya serta sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan segala rahmat Nya;
2. Dra. Nanik Istiyani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses dengan Bapak. Bapak juga merupakan seorang motivator nyata dan sekaligus bapak kedua bagi penulis sehingga penulis mampu menjadi pribadi yang berbudi luhur. Semangat dan kegigihan yang Bapak tanamkan kepada saya mampu merajut asa untuk menggapai impian penulis.
3. Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah mencurahkan waktu dan tenaga serta ketersediaan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Siti Komariyah., S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa dan memberikan masukan dalam kehidupan selama menjadi mahasiswa.
5. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

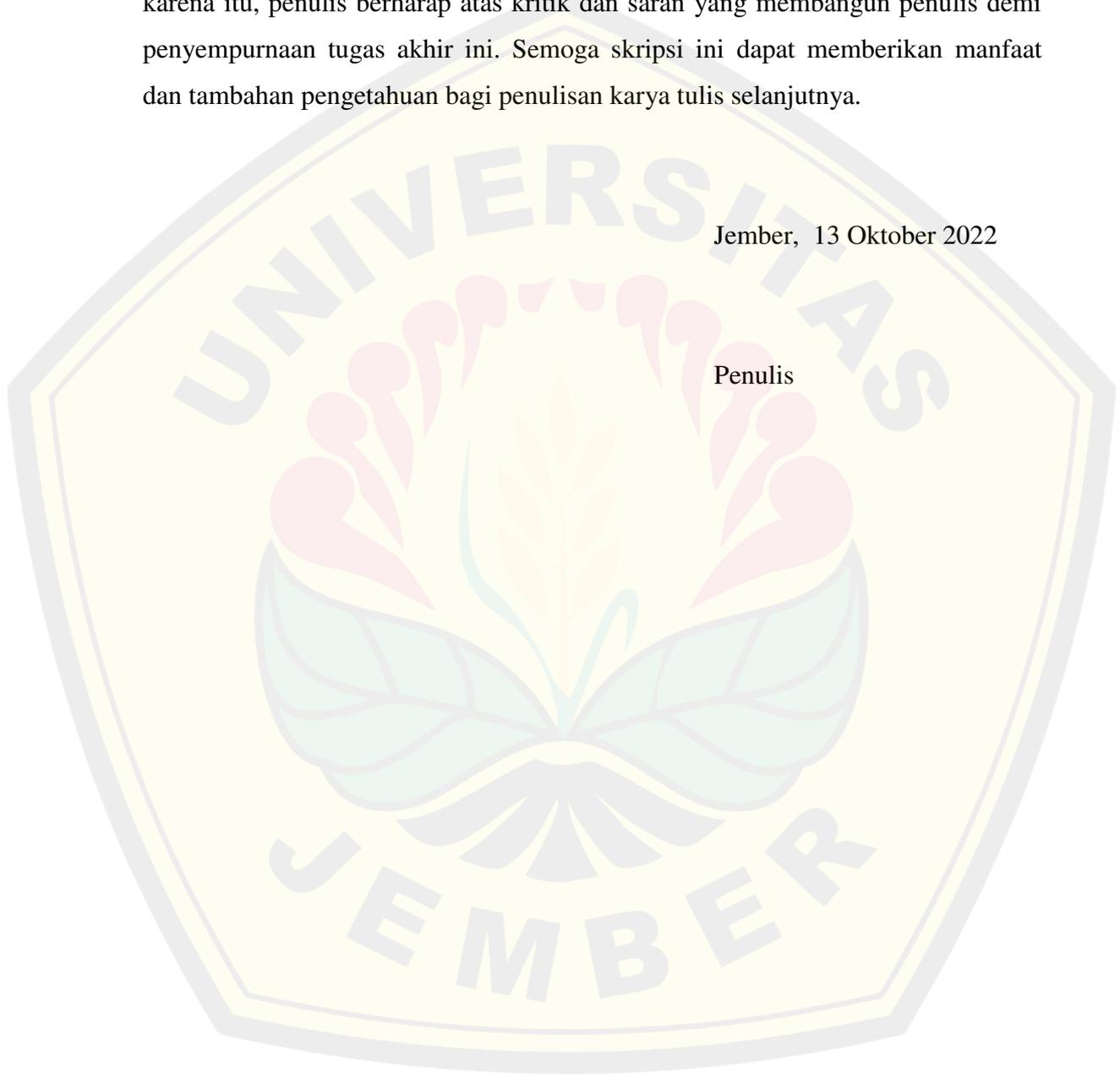
6. Ibu Dr. Riniati. M.P., CPHCM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P., CPHCM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
9. Bapak Sapari dan Ibu Sarmiah, serta kakak saya Linda Novia dan Imam Basuni, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, kerja keras, keikhlasan, ketulusan kesabaran serta semua pengorbanan yang engkau berikan selama ini untuk kehidupan yang lebih baik kepada penulis selama ini. Terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan atas semua apa yang sudah diberikan kepada penulis terutama kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalaskan. Maaf jika ananda dalam waktu ini masih belum bisa membahagiakan bapak dan ibu. Terima kasih sudah menjadi penyemangat, motivasi, inspirasi dan dukungan serta menjadi tempat keluh kesah ananda selama ini. Terlebih terima kasih telah mendampingi ananda hingga mampu menggapai cita-cita ananda di masa depan;
10. Terimakasih untuk Mayusuf Aji, yang memberi semangat dan motivasi, kasih dan sayang yang telah diberikan kepada penulis untuk terus maju ke depan;
11. Teman-temanku Abdul Harris, Chintya, Lazuardy, Fury, Nisa, Fatma, Nopelia, Dinda, Tari, yang telah mendukung pengerjaan skripsi;
12. Semua teman-teman seperjuangan Sumber Daya Manusia 2016, terima kasih atas semua canda tawa serta pengalaman dan kenangan yang telah kalian berikan. Terima kasih sudah mengajarkan kedewasaan dalam memahami satu sama lain. Semoga kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan;
13. Teman-teman KKN 268 Sumberkatimoho, atas seluruh pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan selama tinggal di Desa Katimoho, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo;
14. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 atas kebersamaan kalian;

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa didunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, dan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 13 Oktober 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Tenaga Kerja	16
2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja	17
2.1.3 Teori Penyerapan Tenaga Kerja	19
2.1.4 Teori Upah	20
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.6 Teori Investasi.....	26
2.1.7 Teori Pendidikan.....	28
2.1.8 Hubungan Antar Varibael.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Konseptual.....	38

2.4 Hipotesis Penelitian	40
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Rancangan Penelitian.....	41
3.1.1 Jenis Penelitian	41
3.1.2 Tempat, Waktu dan Unit Analisis Penelitian.....	41
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2 Metode Analisis Data.....	42
3.2.1 Analisis Kuantitatif.....	42
3.2.2 Analisis <i>Panel Least Square</i> (PLS)	42
3.3 Pengujian Model	44
3.3.1 Uji Chow.....	44
3.3.2 Uji Hausman	44
3.3.3 Uji Lagrange Multiplier	45
3.4 Uji Statistik.....	45
3.4.1 Uji -t (Uji Koefisien Regresi).....	45
3.4.2 Uji -F (Uji Simultan).....	45
3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.5 Uji Asumsi Klasik	46
3.5.1 Uji Multikolinearitas.....	46
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	46
3.5.3 Uji Normalitas.....	47
3.6 Definisi Operasional Variabel	47
BAB 4. PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Pulau Jawa	49
4.1.1 Deskripsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Kondisi Variabel Demografi di Pulau Jawa.....	50
4.1.2 Interaksi Penyerapan Tenaga Kerja pada Variabel Makroekonomi di Pulau Jawa	55
4.2 Hasil Olah Data.....	59
4.2.1 Pemilihan Model Terbaik	59
4.2.2 Analisis Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	60

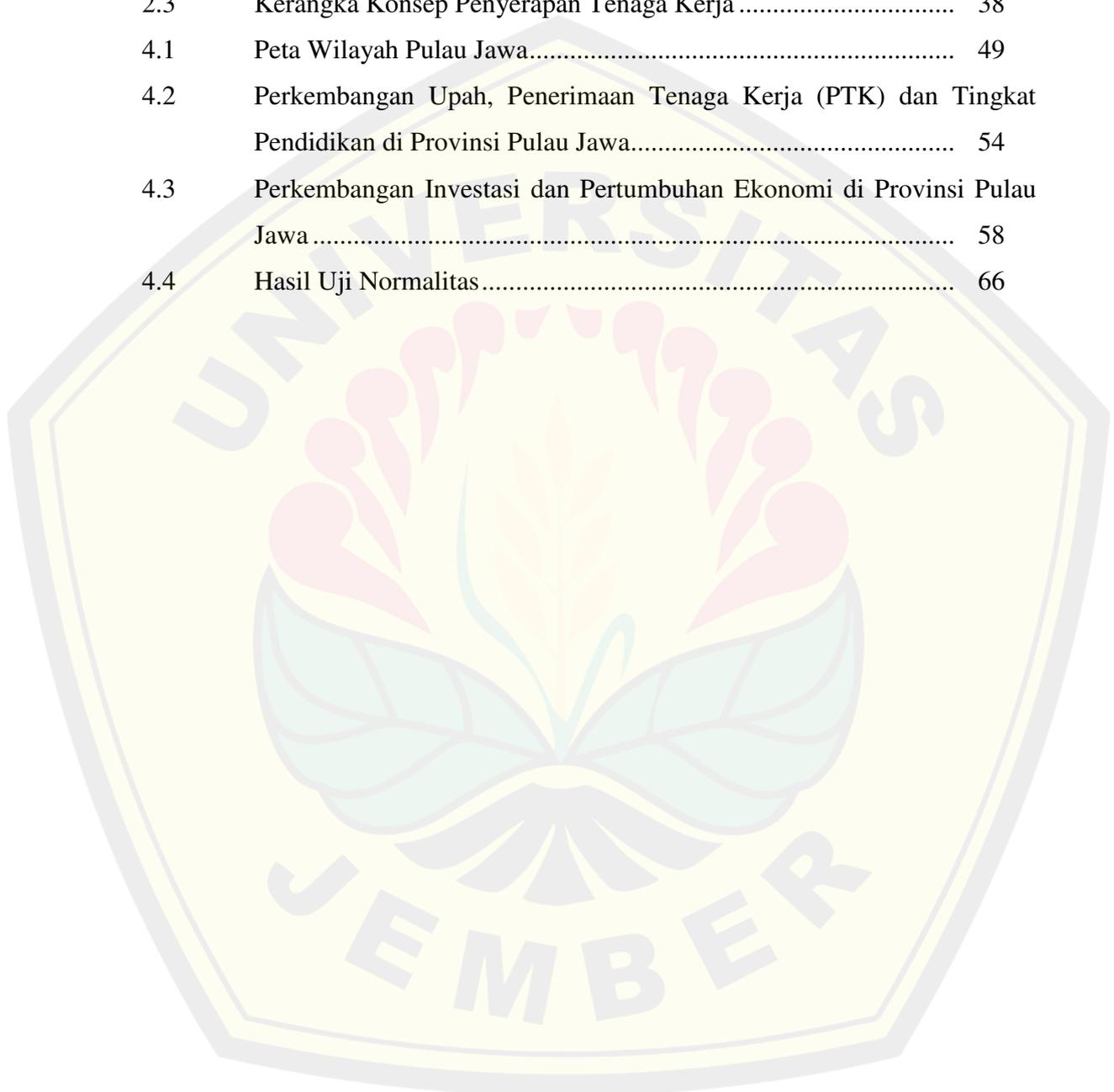
4.2.3 Uji Statistik	62
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	64
4.3 Pembahasan	66
4.3.1 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	66
4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	68
4.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	69
4.3.4 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	70
BAB 5. PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Angkatan Kerja 6 Pulau di Indonesia Tahun 2017– 2021.....	3
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Pulau Besar di Indonesia Tahun 2014 – 2021.....	4
1.3	Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021.....	5
1.4	Rata-Rata Upah Minimum Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021.....	8
1.5	Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) Pulau Jawa Tahun 2014 – 2019	11
1.6	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri Pulau Jawa Tahun 2014–2019	12
1.7	Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021	13
2.1	Penelitian Terdahulu	34
4.1	Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2014-2021	50
4.2	Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-2021	52
4.3	Tingkat Upah di Pulau Jawa Tahun 2014-2021.....	53
4.4	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2021 ...	56
4.5	Nilai Investasi di Pulau Jawa Tahun 2014-2021.....	57
4.6	Hasil Uji Chow	59
4.7	Hasil Uji Hausman.....	60
4.8	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	60
4.9	Hasil Analisis Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	61
4.10	Hasil Uji t (Uji Parsial)	62
4.11	Hasil Uji F Statistik.....	63
4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64
4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	64
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

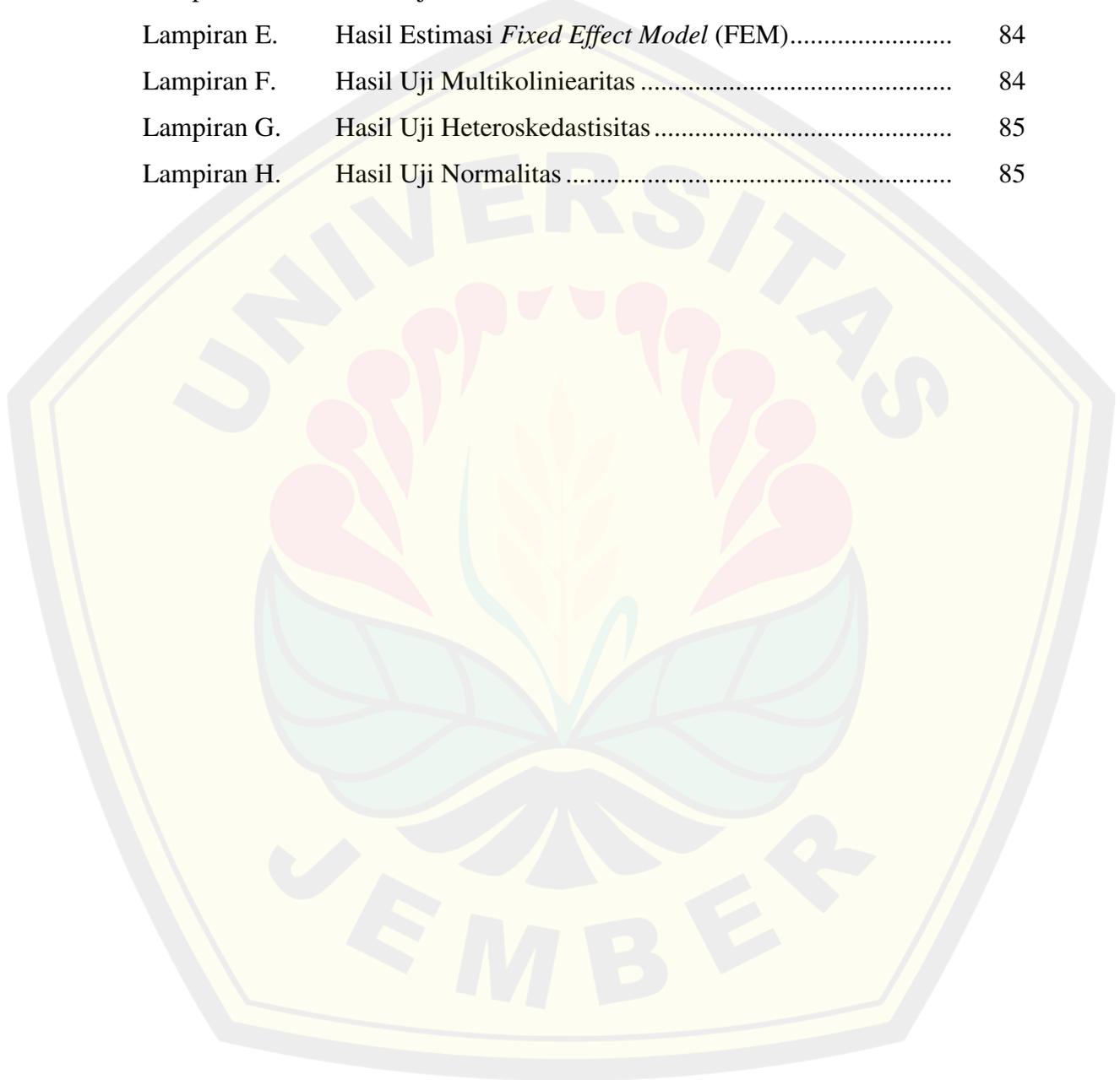
DAFTAR GAMBAR

1.1	Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2014 – 2021	10
2.1	Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah.....	18
2.2	Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah.....	19
2.3	Kerangka Konsep Penyerapan Tenaga Kerja	38
4.1	Peta Wilayah Pulau Jawa.....	49
4.2	Perkembangan Upah, Penerimaan Tenaga Kerja (PTK) dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Pulau Jawa.....	54
4.3	Perkembangan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Pulau Jawa	58
4.4	Hasil Uji Normalitas.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.	Data Penelitian.....	79
Lampiran B.	Hasil Uji Hausman.....	81
Lampiran C.	Hasil Uji Chow	82
Lampiran D.	Hasil Uji LM.....	83
Lampiran E.	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	84
Lampiran F.	Hasil Uji Multikolinieritas	84
Lampiran G.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
Lampiran H.	Hasil Uji Normalitas	85



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berusaha memperbaiki perekonomiannya domestik melalui sejumlah kebijakan dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan dalam arti yang luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000). Tujuan inti dari proses pembangunan yaitu: meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Lincoln, 2010).

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam pembangunan nasional suatu bangsa yang merupakan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam belum tentu mampu mengembangkan perekonomiannya jika tidak didukung oleh sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam pertumbuhan ekonomi (Hartanto, 2017). Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, namun di sisi lain juga akan berakibat buruk jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bila mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari masalah-masalah yang berkaitan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah pesatnya jumlah peningkatan angkatan kerja dan

tingginya angka pengangguran. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2035 mencatat pada Agustus 2019 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,67 juta jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 197,91 juta jiwa, bertambah 1,61% dibandingkan keadaan Agustus 2018 sebesar 194,78 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2019 sebesar 133,56 juta jiwa bertambah 1,95% dibandingkan keadaan pada Agustus 2018 sebesar 131,01 juta jiwa. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 0,94% dari Agustus 2018 – Agustus 2019. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 mencapai 126,51 juta jiwa bertambah sekitar 2,02% (2,50 juta jiwa) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 (124,01 juta jiwa). Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 7,05 juta jiwa, bertambah 50 ribu jiwa dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 (7 juta jiwa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 sebesar 0,90%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 5,28% mengalami penurunan sebesar 0,06% Agustus 2018 dibanding TPT Agustus 2018 (5,34%). Dengan demikian TPT di Indonesia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia belum dapat dijadikan indikasi bahwa kondisi ketenagakerjaan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan seseorang akan terus berusaha bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera.

Pulau Jawa merupakan pulau terbesar dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Diperkirakan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2019 mencapai 150,4 juta jiwa atau setara dengan 56% penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan potensi tenaga kerja yang besar bagi pembangunan. Namun disisi lain, pertumbuhan penduduk yang besar akan berakibat pada timbulnya permasalahan dan hambatan dalam upaya pembangunan yang dilakukan, karena jumlah penduduk yang besar tersebut menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja. Pulau Jawa sendiri merupakan Pulau dengan pusat perekonomian terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Indonesia Tahun 2017– 2021 (jiwa)

Pulau	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera	27.036.366	27.996.460	29.918.417	31.821.672	33.491.593
Jawa	73.909.597	75.051.030	77.763.107	79.932.086	81.328.648
Kalimantan	7.744.740	7.997.537	8.579.207	9.811.491	10.925.194
Sulawesi	9.949.396	10.484.004	11.249.634	12.867.823	13.245.619
Papua	2.193.317	2.281.593	2.285.500	2.501.838	22.887.336
Nusa Tenggara & Bali	7.229.228	7.249.017	7.965.324	8.354.729	8.842.984

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa menduduki peringkat pertama dengan jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Pulau lainnya. Tercatat jumlah angkatan kerja keseluruhan di Pulau Jawa pada tahun 2019 sebesar 77.763.107 jiwa atau sekitar 63% dari keseluruhan total angkatan kerja di Indonesia. Pulau Sumatera menduduki peringkat kedua setelah Pulau Jawa, jumlah angkatan kerja Pulau Sumatera sebesar 29.918.417 jiwa ditahun 2019. Sedangkan jumlah angkatan kerja jauh lebih rendah dari Pulau Jawa berturut-turut yaitu Pulau Sulawesi 11.249.634 jiwa, Pulau Kalimantan sebesar 8.579.207 jiwa, Pulau Nusa Tenggara dan Bali sebesar 7.965.324 jiwa, dan Pulau Papua sebesar 2.285.500 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sebesar 81.328.648 dengan peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia.

Dari keseluruhan Pulau di Indonesia hanya Pulau Jawa yang jumlah angkatan kerjanya terbilang sangat tinggi. Tingginya jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi, sehingga tenaga kerja yang ada dapat terserap ke dalam aktivitas perekonomian. Tingginya jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja dalam pasar bertambah tetapi tidak diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Pulau Jawa. Masalah pengangguran merupakan

masalah yang selalu dihadapi oleh seluruh negara di Dunia, baik negara maju maupun berkembang. Menurut Pujolwanto (2014), Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan pekerjaan yang terserap. Hal ini terjadi karena adanya kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk yang tinggi mengindikasikan adanya ledakan penduduk usia kerja, sedangkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menampung jumlah penduduk tersebut, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Indonesia Tahun 2014 – 2021 (persen)

Tahun	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Papua	Nusa Tenggara & Bali
2014	58.44	39.19	18.46	42.79	8.46	10.91
2015	64.31	39.03	27.79	48.61	12.06	11.51
2016	52.45	35.49	27.68	34.14	10.81	9.08
2017	51.24	36.25	25.80	42.00	10.11	8.08
2018	50.1	34.78	24,59	38.12	9.05	8.01
2019	49.66	34.13	23.00	35.5	9.94	7.99
2020	51.34	36.67	24.71	36.21	10.92	8.74
2021	52.98	39.01	25.03	37.53	12.09	9.82

Sumber: Badan Pusat Statistit 2020, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 terbesar terdapat pada Pulau Sumatera sebesar 49,66%, lalu TPT selanjutnya adalah Pulau Sulawesi sebesar 35,5% dan diikuti Pulau Jawa sebesar 34,13%. Sedangkan pada tahun 2021 persentase TPT di Pulau Jawa sebesar 39,01% yang mengalami peningkatan 5,13% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 Pulau Nusa Tenggara dan Bali masih memiliki nilai TPT terendah yakni sebesar 9,82%. Akan tetapi menurut BPS tingkat pengangguran terbuka di pulau besar di Indonesia pulau Jawa masih tergolong tinggi tingkat penganggurannya dibandingkan Pulau lainnya. Padahal secara real Tingkat

Pengangguran di Pulau Jawa lebih kecil dibandingkan Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi karena angkatan kerja yang terserap di Pulau Jawa masih tinggi maka memungkinkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa cukup tinggi. Berbeda dengan Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi jumlah angkatan kerja yang terserap lebih rendah dari Pulau Jawa maka penyerapan tenaga kerjanya masih rendah yang memungkinkan pengangguran di Pulau tersebut tinggi.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi meningkatnya beban masyarakat, yang merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Penambahan jumlah pengangguran yang meningkat dari waktu ke waktu akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi peningkatan kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009).

Tabel 1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021 (jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPT (%)
2014	66.532.537	4.595.611	71.128.148	35.908.680	39.19
2015	66.035.108	4.523.379	70.558.487	38.061.461	39.03
2016	66.820.466	4.387.113	71.207.579	38.924.781	35.49
2017	69.477.208	4.432.389	73.909.597	37.725.871	36.55
2018	71.411.100	4.446.129	75.857.229	38.479.328	34.78
2019	73.279.477	4.483.630	77.763.107	38.009.366	34.13
2020	73.938.130	5.993.956	79.932.086	38.581.024	36.67
2021	74.431.687	6.896.961	81.328.648	38.972.503	39.01

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan keadaan ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Pulau

Jawa pada tahun 2014 – 2021 cenderung fluktuatif. Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 71.128.148 juta jiwa turun menjadi 70.558.487 juta jiwa di tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 71.207.579 juta jiwa mengalami kenaikan terus menerus hingga tahun 2019 menjadi 77.763.107 juta jiwa. Penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 66.532.537 juta jiwa turun menjadi 66.035.108 juta jiwa ditahun 2015, kemudian ditahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan secara terus menerus disetiap tahunnya. Tetapi jika dilihat dari tingkat penganggurannya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tingkat pengangguran mengalami penurunan, dari tahun 2014 sebesar 4.595.611 juta jiwa turun menjadi 4.387.113 juta jiwa pada tahun 2016, dan ditahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat pengangguran mengalami kenaikan terus menerus. Pada tahun 2021, jumlah pekerja yang berada di Pulau Jawa sebesar 74.431.687 jiwa dimana diikuti oleh TPT sebesar 39,01% dengan peningkatan 3,66% jika dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 36,67%.

Pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan sendiri. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin bertambah. Seperti halnya Pulau Jawa tingkat penganggurannya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Keberhasilan sebuah pemerintah dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui seberapa besar pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga akan mengakibatkan peningkatan pendapatan dan daya beli yang ada juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramitha, 2009:1).

Adam Smith (1729–1790) merupakan tokoh aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. Klasik berpendapat bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan menuju keseimbangan sumber daya yang

berarti sumber daya tenaga kerja yang nantinya akan dimanfaatkan secara penuh. Apabila terjadi pengangguran pemerintah tidak perlu turun tangan untuk melakukan suatu kebijakan. John Maynard Keynes (1883–1946) berpendapat bahwa dalam kenyataannya pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja akan terjadi jika adanya campur tangan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian. Pada kenyataannya pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai pandangan klasik karena para tenaga kerja harus memiliki serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingan tenaga kerja dari penurunan tingkat upah.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha untuk meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah diterapkan di beberapa negara, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Dalam kenaikan produktivitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dengan adanya kemajuan teknologi memproduksi, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja dan perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat (Sukirno, 2003).

Tabel 1.4 Upah Minimum Pulau Jawa Tahun 2014 – 2021 (rupiah)

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	2.441.000	2.700.000	3.100.000	3.355.750	3.648.035	3.940.972	4.590.236	4.683.120
D.I.Y	988.500	988.000	1.337.645	2.186.464	2.114.031	2.311.599	2.489.210	2.591.521
Jawa Timur	1.000.000	1.000.000	2.129.900	2.238.587	2.398.992	2.479.910	2.831.900	2.936.520
Jawa Barat	1.000.000	1.000.000	2.250.000	3.170.803	3.202.864	3.337.573	3.409.255	3.589.120
Jawa Tengah	910.000	910.000	1.875.000	2.010.062	2.158.681	2.190.251	2.411.401	2.548.193
Banten	1.325.000	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.385	2.267.990	3.787.250	3.828.600

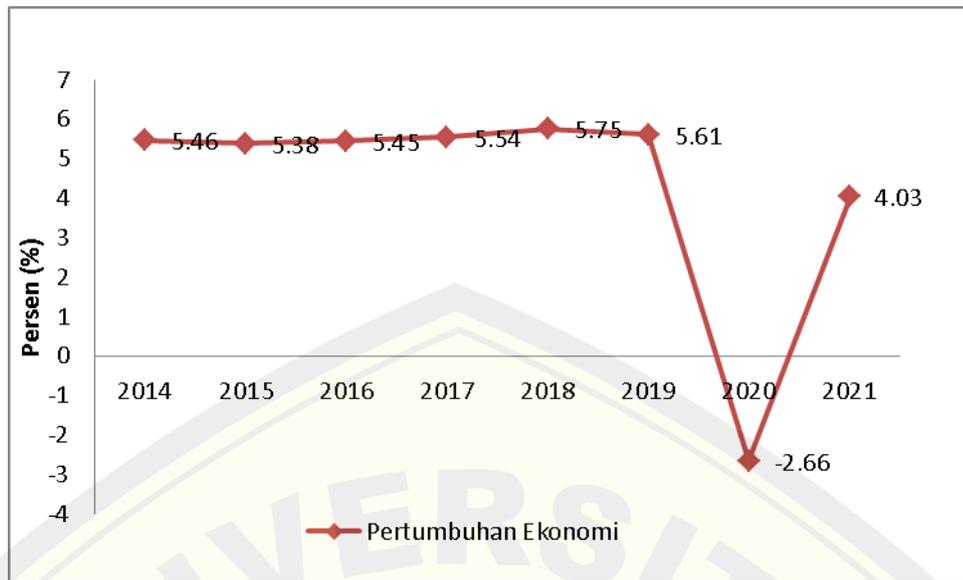
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata upah minimum di setiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat dari tahun 2014 sampai tahun 2021 upah di Pulau Jawa mengalami kenaikan terus menerus. Terjadinya kenaikan upah akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Dimana, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan yang berakibat pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Sehingga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingginya upah minimum provinsi merupakan salah satu faktor potensial yang dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera (Buchari, 2016).

Menurut Sumarsono (2003) terjadinya perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya, kenaikan upah akan mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Rini (2013) dalam penelitiannya, terjadinya kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap berkurangnya lapangan pekerjaan yang juga akan berimbas terhadap

berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2002), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input yang lain, keadaan tersebut mendorong perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang harga relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimal.

Selain upah, faktor yang menjadi perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan modal melalui investasi dan tabungan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja melalui pertumbuhan angkatan kerja dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta adanya penyempurnaan teknologi dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari seberapa besar PDRB di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan satu dari enam Pulau di Indonesia yang mempunyai nilai Produk Domestik Regional Bruto tinggi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu tertentu. Apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan mengalami peningkatan. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksi dapat ditingkatkan untuk mengejar penjualan (Feriyanto, 2014).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2014 – 2021
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah)

Dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa proksi dalam PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2014–2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014–2015 pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa mengalami penurunan, kemudian dilanjutkan pada tahun 2015–2018 pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa mengalami kenaikan secara terus menerus, dan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan lagi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan yang akhirnya berdampak terhadap perekonomian Pulau Jawa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia mengawali dampak Pandemi Covid-19 dengan turunnya pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak terkecuali Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa tahun 2020 berada pada -2,66% yang menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi secara nasional. Pada tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menunjukkan pertumbuhan ekonomi sudah mengalami perbaikan pada posisi 4,03%.

Pulau Jawa sebagai salah satu Pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar terus berkembang pesat disegala kegiatan dan juga menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan Pulau Jawa. Baik dari kegiatan sektor jasa, produksi, transportasi dan komunikasi yang saling berkontribusi satu dengan lainnya. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan berdampak terhadap terserapnya tenaga kerja. Dengan begitu diperlukan dukungan dari pemerintah dan juga swasta untuk mewujudkannya. Salah satu jalan untuk memperkuat perekonomian adalah investasi, investasi akan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, dimana dengan adanya investasi maka akan meyebabkan terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat menampung para angkatan kerja yang siap bekerja dalam angka yang besar.

Investasi dibagi menjadi dua yaitu, PMA dan PMDN. PMA merupakan penanaman modal asing atau investor asing, sedangkan PMDN merupakan penanaman modal dalam negeri. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang sangat diminati para investor asing untuk menanam modal. Selain wilayah Jawa yang strategis Pulau Jawa juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 1.5 Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) Pulau Jawa
Tahun 2016 – 2021 (ratusan juta)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	4509,4	3619,4	3398,2	4595	4857,7	4123
Jawa Barat	6562	5738,7	5470,9	5142,9	5573,5	5881
Jawa Tengah	463,4	850,4	1030,8	2372,5	2372,7	2723,2
DIY Yogyakarta	64,9	89,1	19,6	36,5	81,3	14,6
Jawa Timur	1802,5	2593,4	1941	1566,7	1333,4	866,3
Banten	2034,6	2542	2912,1	3047,5	2827,3	1868,2

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Dapat dilihat pada tabel 1.5 penanaman modal asing di Pulau Jawa pada tahun 2014–2019 mengalami fluktuatif. Penanaman modal terbesar didukung oleh empat Provinsi yaitu: Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur. Empat Provinsi ini memiliki penanaman modal yang sangat tinggi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru agar tenaga kerja di Pulau Jawa dapat terserap dengan maksimal.

Tabel 1.6 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD) Pulau Jawa Tahun 2016–2021 (ratusan juta)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	171811,5	15512,7	12216,9	47262,3	49097,4	62094,8
Jawa Barat	18726,9	26272,9	30360,2	38390,6	42278,2	49284,2
Jawa Tengah	13601,6	15410,7	24070,4	19866	27474,9	18654,7
DIY Yogyakarta	703,9	362,4	948,6	294,6	6131,7	6298,8
Jawa Timur	38132	35489,8	46331,6	45044,5	33333,1	45452,7
Banten	8081,3	10709,9	12426,3	15141,9	18637,6	20708,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sama halnya dengan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri Pulau Jawa tahun 2016–2021 juga mengalami fluktuatif. Terlihat disetiap Provinsi penanaman modal dalam negeri mengalami naik turun, tetapi hanya Provinsi Banten penanaman modalnya mengalami naik terus menerus. Investasi memberikan dampak baik terhadap tingginya kualitas sumber daya manusia, dimana semakin banyak investasi maka akan semakin banyak dibuka lapangan pekerjaan. Tujuan utama dari adanya investasi seperti modal asing dan modal dalam negeri diharapkan mampu menciptakan keuntungan yang bersifat positif, baik langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang tidak langsung berupa adanya peningkatan pendapatan daerah yang berfungsi sebagai komponen penunjang pendapatan nasional, sedangkan keuntungan yang langsung dapat berupa penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk tiap negara yang bersangkutan. Beberapa faktor yang menjadi minat investor asing terhadap suatu wilayah selain sumber daya manusia juga sumber daya alamnya yang melimpah. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap sistem perekonomian suatu wilayah yaitu produksi, konsumsi, distribusi dan investasi (Rompas, 2013). Adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru, sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran (Prasojo dalam Sandika dkk., 2014).

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pada umumnya seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempunyai produktivitas kerja yang baik pula. Karena dengan pendidikan seseorang memiliki modal untuk melakukan produktivitas didalam suatu pekerjaan yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dengan demikian pendidikan merupakan syarat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Tanpa adanya pendidikan mustahil bagi seseorang untuk lebih mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang individu maka peluang di terima menjadi tinggi pula. Dengan tingginya pendidikan seseorang maka nilai waktu yang dimiliki menjadi mahal. Menurut Edy (2009) menjelaskan tingkat pendidikan individu akan mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikannya dan lebih leluasa bersaing dengan tenaga kerja yang lain.

Tabel 1.7 Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2021 (tahun)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	10.88	11.02	11.05	11.06	11.13	11.17
D.I.Y	9.12	9.19	9.32	9.38	9.95	10.06
Jawa Timur	7.23	7.34	7.39	7.59	7.81	8.12
Jawa Barat	7.95	8.14	8.15	8.37	8.63	8.91
Jawa Tengah	7.15	7.27	7.35	7.53	7.72	8.03
Banten	8.37	8.53	8.62	8.74	8.63	8.92

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di setiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2021. Dari penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak penduduk yang mengenyam bangku pendidikan disetiap tahunnya. Penyerapan tenaga kerja biasanya didasarkan pada tingkat kualitas tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang dimilikinya yang nantinya akan mempengaruhi produktivitas kerja, karena pendidikan merupakan modal untuk menciptakan

produktivitas yang tinggi dalam suatu pekerjaan (Ganie, 2017). Menurut (Lavrinovicha, Lavrinenko & Treinovskis, 2015) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin dominan status pekerjaan di pasar tenaga kerja. Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian (Buchari, 2016) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan memberikan dampak signifikan positif pada penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa ?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa ?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

1.4 Manfaat Penelitian

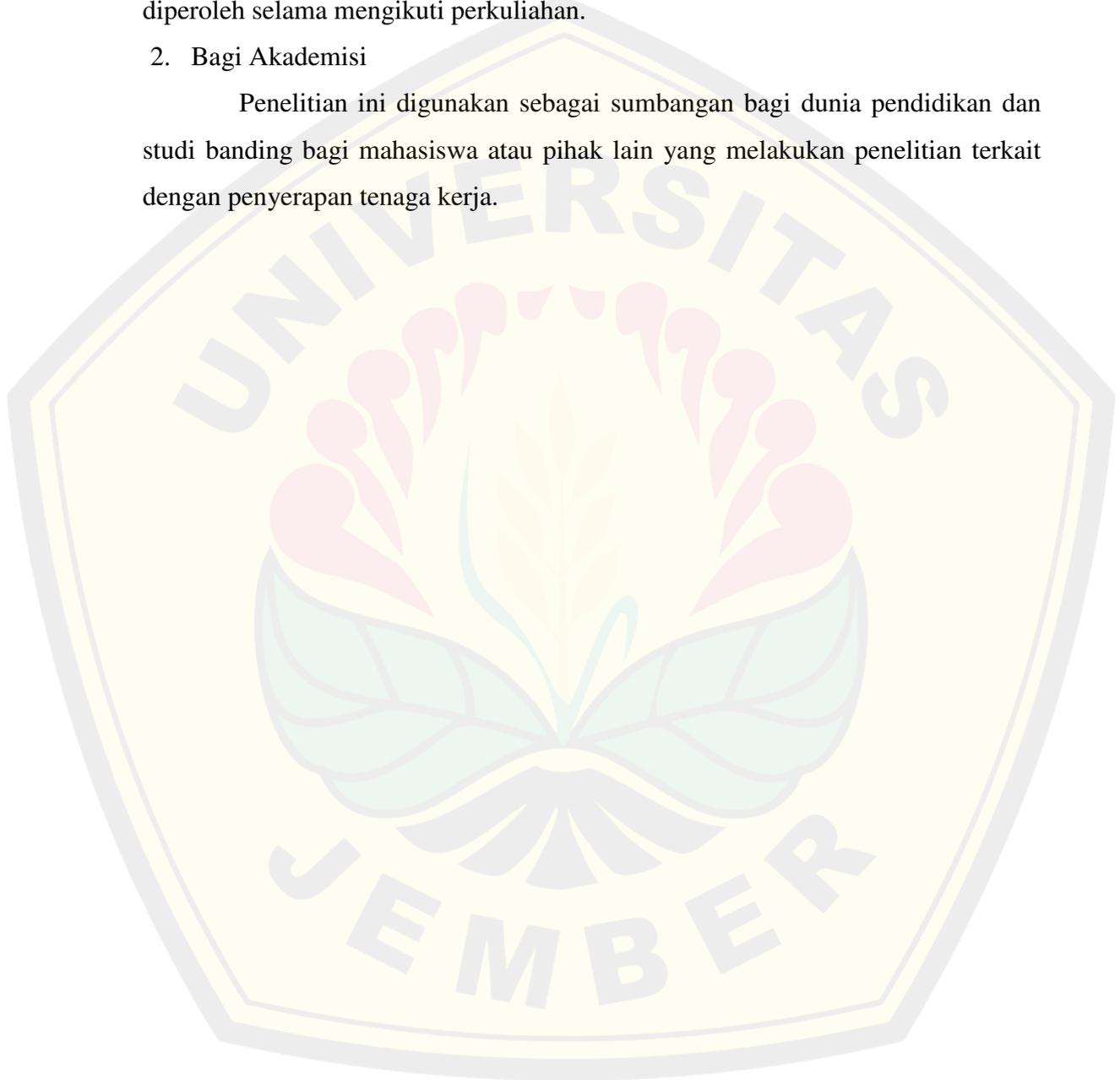
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu yang di peroleh, juga sebagai aplikasi terhadap teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini digunakan sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan dan studi banding bagi mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian terkait dengan penyerapan tenaga kerja.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan individu maupun untuk masyarakat. Menurut (Pujoalwanto, 2014) penduduk disuatu Negara dibagi menjadi dua macam. Yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

1. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa mereka yang sudah memasuki usia antara 15 tahun sampai 64 tahun bisa disebut sebagai tenaga kerja
 - a. Tenaga Kerja terlatih merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam menguasai suatu bidang pekerjaan yang dilakukan berkali-kali dan didapatkan dari pengalaman kerja.
 - b. Tenaga Kerja terdidik merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam menguasai suatu bidang pekerjaan tertentu dan didapatkan dari menjalani pendidikan formal dan non formal.
 - c. Tenaga Kerja tak terlatih dan tak terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam mengutamakan tenaganya untuk mengerjakan suatu pekerjaan tanpa memperhatikan pendidikan ataupun pengalaman dari pekerjaan tersebut.
2. Bukan Tenaga Kerja adalah mereka yang berusia dibawah umur 15 tahun dan diatas 64 tahun dan tidak bekerja maupun tidak ingin bekerja meskipun ada kesempatan kerja. Menurut Tradena (2017) batas kerja dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a. Angkatan Kerja adalah golongan penduduk usia produktif antara usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun dan dikategorikan sudah memiliki pekerjaan maupun tidak bekerja atau masih mencari pekerjaan.

- b. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang masih berusia 10 tahun atau lebih tapi masih berstatus menempuh pendidikan maupun sebagai ibu rumah tangga.

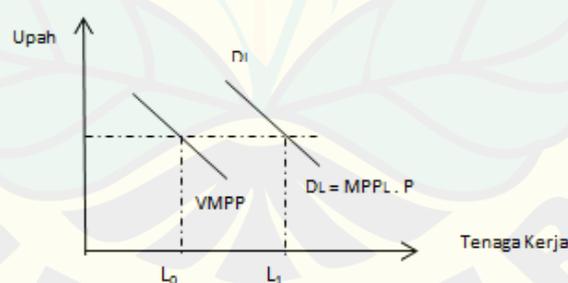
Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi, karena dalam proses produksi tanpa adanya campur tangan manusia yang menggerakkan semua sumber-sumber seperti bahan mentah, air, tanah tidak akan menghasilkan barang jadi. Tenaga kerja secara umum adalah manusia yang mampu bekerja dan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori Permintaan Tenaga Kerja merupakan teori yang menjelaskan bagaimana lapangan usaha dapat mempekerjakan para tenaga kerja dengan tingkat upah tertentu. Tenaga kerja dengan permintaan pemilik modal atau pengusaha sejajar dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa (Sumarsono, 2009). Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan fungsi bagi pembeli. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu dalam proses memproduksi barang dan jasa untuk dijual ke konsumen. Sehingga bertambahnya permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja dipengaruhi oleh pertambahan permintaan konsumen atas barang yang akan dikonsumsi pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*Derived demand*) artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta terus bertambah karena terjadinya perubahan ekonomi. Pemakaian tenaga kerja tergantung pada perusahaan yang bersangkutan, jika perusahaan cenderung padat karya maka penggunaan tenaga kerja meningkat, tetapi jika perusahaan cenderung padat modal maka penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai alat untuk produksi. Perusahaan biasanya mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan memilih jumlah tenaga kerja terbaik sehingga akan memunculkan kesempatan kerja yang tinggi dan ini berarti tidak akan lagi terjadi penduduk yang tidak bekerja (Sumarsono, 2009).

Pada fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada teori ekonomi Klasik. Di dalam pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Untuk memaksimalkan laba, pengusaha hanya bisa mengatur seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang dipekerjakannya. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada: (1) tambahan hasil marginal, yaitu nilai tambahan hasil (*output*) yang diperoleh dengan penambahan tenaga kerja atau biasa disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga kerja (MPPL), (2) permintaan marginal, yaitu jumlah uang yang didapatkan pengusaha dengan tambahan hasil marginal disebut penerimaan marginal atau *Marginal Revenue* (MR). Permintaan marginal merupakan besarnya tambahan hasil marginal dikalikan dengan harga per unit. (3) biaya marginal, yaitu jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemilik modal dengan mempekerjakan tenaga kerja. Apabila tambahan penerimaan marginal lebih besar dibandingkan dengan biaya marginalnya, maka mempekerjakan tenaga kerja tersebut akan menambah keuntungan pemilik modal, sehingga pengusaha akan terus menambah jumlah tenaga kerja selama MR lebih besar daripada tingkat upah. *Value Marginal Physical Product of Labor* (VMPP) merupakan nilai tambah hasil marginal dari tenaga kerja. P merupakan harga jual dari barang per unit, D_L merupakan permintaan tenaga kerja, W merupakan tingkat upah, L merupakan tenaga kerja.



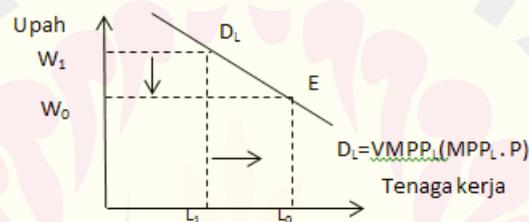
Gambar 2.1 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah

Sumber: Bellante dan Jackson, 1990

Pada Gambar 2.1 menunjukkan pertambahan permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan masyarakat akan barang maupun jasa yang akan dikonsumsi. Semakin tinggi permintaan barang dan jasa maka

semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan dengan asumsi tingkat upah yang tetap.

Penambahan jumlah tenaga kerja tidak akan dilakukan dalam jangka pendek karena perusahaan akan lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja dengan merubah jam kerja maupun menggunakan teknologi dalam jangka pendek. Berbeda dengan jangka panjang perusahaan akan lebih memilih untuk penambahan tenaga kerjanya. Perusahaan selalu menyesuaikan tingkat tenaga kerja yang digunakan dengan tingkat upah. Artinya jika tingkat upah mengalami penurunan maka perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakannya. Penurunan tingkat upah disajikan pada gambar 2.2 dimana kurva D_L memproyeksikan besarnya hasil marjinal tenaga kerja ($VMPP_L$).



Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah

Sumber: Bellante dan Jackson, 1990

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja merupakan terbukanya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang mampu menjadi magnet bagi para tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan (Prasetya, 2015). Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan dimana para tenaga kerja membutuhkan pekerjaan pada tingkat upah tertentu maka akan memperoleh pekerjaan dengan mudah dibandingkan dengan para pekerja yang menginginkan upah yang tidak sewajarnya (Sukirno, 2005). Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya tenaga kerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2003).

Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang

bekerja. Penduduk tersebut terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk di berbagai sektor perekonomian disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja juga akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Tenaga kerja telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal tersebut akan berdampak menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara bersama sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu keseimbangan tenaga kerja. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga kerja berbeda-beda cara kerjanya, bisa dibedakan sesuai pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk mendapatkan kerja disektor formal (Bellante and Jackson, 1983). Menurut Sumarsono, (2003) Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor tidak selalu sama.

2.1.4 Teori Upah

Teori upah klasik mengatakan bahwa kenaikan upah akan menaikkan jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga permintaan akan kebutuhan hidup akan meningkat pula sehingga produsen akan menambah tenaga kerjanya untuk memenuhi permintaan terhadap produknya. Menurut teori permintaan tenaga kerja kenaikan upah yang dibebankan pada konsumen atau menaikkan harga produk akan menyebabkan berkurangnya permintaan yang kemudian akan membuat perusahaan menurunkan tingkat produksinya sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut teori penawaran tenaga kerja kenaikan upah akan menambah penawaran akan tenaga kerja.

Menurut Sumarsono (2009) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Terdapat dua pengertian perbedaan uang (Sukirno, 2005)

1. Upah Nominal (*upah uang*) merupakan jumlah nominal uang yang diterima para tenaga kerja atau buruh dari perusahaan sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
2. Upah Riil merupakan tingkat upah para pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Menurut Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan..

1. Upah Minimum

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah juga harus mengacu pada data inflasi dan pertumbuhan perekonomian setiap tahunnya. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Penetapan upah juga ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi

Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota. Besaran UMK dan UMR berbeda, UMR lebih besar dari UMK.

Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi tenaga kerja. Kebijakan upah minimum yaitu penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Penetapan kebijakan upah minimum adalah sebagai jaringan pengaman (*social safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak mengalami kemerosotan akibat dari ketidakseimbangan pasar kerja, dan dimaksudkan untuk menjaga agar tingkat upah pekerja berada pada level bawah tidak jatuh ketingkat yang sangat rendah karena rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar kerja. Dengan demikian pekerja pada level bawah tersebut masih dapat hidup wajar dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dalam penetapan upah minimum harus mempertimbangkan standar kehidupan pekerjanya.

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat di bedakan menurut dua yaitu, (1) Menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) Berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas (Sumarsono, 2009). Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan dinegara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara–negara kapitalis. Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl mark dibagi menjadi 3 (Sumarsono, 2009) :

1. Kebutuhan konsumsi tiap–tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira- kira sama.
2. Sistem pengupahan memberikan intensif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar–benar mau bekerja menurut kemampuannya.

Menurut penelitian Ehrenberg (1998) menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan, sehingga akan terjadi banyaknya pengangguran. Sebaliknya, jika tingkat upah rata-rata turun akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan tingkat upah. Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dan akan meningkatkan harga jual per unit barang yang diproduksi.

Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama pada tenaga kerja yang produktivitasnya rendah (Sulistiawati, 2012). Kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input yang lain, keadaan tersebut mendorong perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang harga relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimal (Kuncoro, 2002). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara upah minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdapat dua aspek utama yaitu: Pertama, Pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya insani, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya

ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Menurut Adam Smith, sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Menurut Adam Smith, stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumberdaya alam). Kedua, Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah diatas tingkat upah subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tari-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (DL) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (SL). Permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output. (Adam Smith 1776 dalam Skusen, 2005).

Pandangan neoklasik Solow, 1956 menyatakan pertumbuhan didukung oleh akumulasi modal dengan “*diminishing rate*” dalam jangka panjang. Sebagai konsekuensinya, negara akan mencapai “*steady-state*” nya dalam jangka panjang, yaitu stagnasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu implikasi dari model pertumbuhan ini adalah bahwa negara-negara terbelakang dengan ekonomi terbuka akhirnya dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju sebab

modal mengalir dari negara maju ke negara terbelakang sehingga dapat menawarkan keuntungan yang lebih tinggi atas investasi, yang mengakibatkan *konvergensi* ekonomi (Todaro dan Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas produksi suatu negara dengan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang berguna menghasilkan suatu pendapatan yang relatif tinggi (Todaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang mana juga tercermin dari peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang untuk meningkatkan barang dan jasa (Jhingan, 2004). Pertumbuhan ekonomi atau *Gros Domestic Product* (GDP) dapat dihitung berdasarkan nominal dan riil. Nilai keseluruhan dari barang dan jasa terkahir yang diproduksi dalam negeri yang mengacu pada harga tahun sekarang merupakan GDP nominal. Sedangkan GDP riil adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri yang mengacu pada harga tahun dasar (Badel, 2016). Persamaan perhitungan GDP sebagai berikut :

$$Y = \sum_g P_g Y_g = P_1 Y_1 + P_2 Y_2 + P_3 Y_3, \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana Y adalah pendapatan dan $\sum_g P_g Y_g$ yakni jumlah data n terhadap harga dan tenaga kerja, P_{123} merupakan nilai harga dari data 1 sampai 3 dan Y_{123} adalah jumlah tenaga kerja dari data 1 sampai dengan 3. Persamaan dengan menggunakan pendekatan produksi sebagai berikut :

$$Y = \sum_g VA_f = VA_1 + VA_2 + VA_3, \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana persamaan diatas merupakan turunan dari persamaan sebelumnya yang memiliki nilai sama, yakni :

$$Y = Upah + Penghasilan Laba + Penghasilan, \dots \dots \dots (2.6)$$

Untuk pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan pengeluaran persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + NX, \dots \dots \dots (2.7)$$

Dimana Y adalah pendapatan, C merupakan konsumsi, I adalah investasi, G yakni pengeluaran pemerintah, dan NX adalah nilai ekspor dan impor.

Teori pertumbuhan ekonomi *Solow* yang bersifat eksogen mendapatkan penolakan karena perubahan teknologi bukan lagi berasal dari luar melainkan dari

dalam atau bersifat *endogen* (Mankiw, 2006). Dengan fungsi produksinya sebagai berikut :

$$Y = AK \dots \dots \dots (2.8)$$

Dimana Y merupakan output, A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi pada setiap unit, dan K adalah persediaan modal. Fungsi produksi yang diasumsikan bahwa pendapatan ditabung dan di investasikan mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jumlah modal dengan persamaan sebelumnya yakni :

$$\Delta K = sY - \delta K \dots \dots \dots (2.9)$$

Persamaan diatas menyatakan perusahaan menyediakan modal (ΔK) sama dengan investasi (sY) dikurangi dengan depresiasi (δK). Perubahan sederhana dalam fungsi produksi dapat mengubah secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.6 Teori Investasi

Investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Investasi adalah perputaran ekonomi yang terus berjalan seiring berjalannya waktu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan, terciptanya lapangan pekerjaan, perluasan penyerapan tenaga kerja pada suatu perekonomian terbuka (Sukirno, 2005). Invetasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sandika, Maulida & Setiawan. 2014). Dengan adanya investasi akan mendorong kegiatan ekonomi yang baru dimana akan tercipta lapangan pekerjaan baru. Harrod Domar berpendapat bahwa investasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Investasi memiliki dua peranan penting untuk membawa pengaruh yang baik terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan yang sangat erat pada pendapatan negara. Semakin tinggi kegiatan investasi dilakukan maka semakin tinggi juga pendapatan negaranya. Kedua, investasi dapat

meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang mana akan mempengaruhi penambahan permintaan kebutuhan masyarakat. Dari dua hal ini investasi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam jangka panjang investasi tidak hanya berpengaruh terhadap permintaan agregat melainkan dapat mempengaruhi penawaran agregat melalui perubahan kapasitas produksi. Hal ini akan menyebabkan adanya penyerapan tenaga kerja (Wahyuni, 2014). Kegiatan investasi yang terus berjalan akan berdampak juga pada kondisi sekitar, Karena disitu akan ada kegiatan ekonomi mulai dari pembelian bahan mentah, membayar upah karyawan, perilaku konsumsi dan akan terus mengalami perputaran.

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual investors*) dan investor institusional (*institutional investors*). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang

meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007).

Investasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan pendapatan nasional. Adanya investasi di suatu daerah atau suatu negara akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan berpengaruh terhadap penyerapan faktor produksi yang baru yaitu menciptakan lapangan kerja yang baru maupun kesempatan kerja yang akan menyerap para tenaga kerja. Investasi memiliki hubungan yang sangat erat terhadap penyerapan tenaga kerja. investasi mampu membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran ketika investasi dilakukan oleh pemilik modal. Investasi juga tidak hanya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi juga sangat berperan penting terhadap perekonomian suatu negara. Karena adanya perputaran kegiatan ekonomi yang terus berjalan. Munculnya investasi akan mendorong kegiatan ekonomi yang baru dimana akan ada lapangan pekerjaan baru yang tercipta.

Hal ini akan menyebabkan adanya penyerapan tenaga kerja (Wahyuni, 2014). Investasi merupakan salah satu sarana dan motivasi untuk melakukan pembangunan ekonomi terutama upaya untuk memperluas penggunaan tenaga kerja dalam hal meningkatkan produksinya. Kaum klasik berpendapat bahwa akumulasi kapital adalah salah satu syarat terbentuknya pembangunan ekonomi. Jika dengan adanya pembangunan ekonomi yang dilakukan diharapkan pembangunan tersebut bisa berdampak kepada pendapatan daerah itu. Secara tidak langsung, maka bisa dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal dapat meningkatkan pendapatan maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya (Boediono, 1982).

2.1.7 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dalam pandangan klasik pendidikan bahwa klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya (pengetahuan, ide-ide atau nilai-nilai) telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Pendidikan hanya berfungsi memelihara atau meneruskan ke generasi berikutnya (Sukmadinata, 2009:7). Jadi guru tidak perlu susah-susah mencari ataupun menciptakan pengetahuan, konsep atau nilai-nilai baru sebab semua sudah tersedia tinggal bagaimana menguasai dan mengajarkannya pada siswa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam teori pendidikan klasik lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan tersebut diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu.

Pendidikan adalah proses perubahan perilaku dan sikap pada diri individu atau sekelompok orang yang diusahakan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan cara mendidik mereka. Pendidikan dalam hal ini merupakan pendidikan formal atau resmi yaitu kegiatan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisir dan berjenjang melalui tingkatan-tingkatan tertentu baik bersifat umum maupun khusus. Pendidikan memiliki peranan penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula

kualitas hidupnya. Semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Pendidikan juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas pendidikan akan mengakibatkan peningkatan persaingan dalam mencari pekerjaan. Dengan kondisi tersebut maka pemilihan tenaga kerja yang lebih berkualitas akan ditingkatkan yang diharapkan kedepannya dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan suatu negara. Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja akan mendorong tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan rendah untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Karena dengan minimnya pendidikan dan keterampilan menjadikan tenaga kerja tidak mampu bersaing dalam dunia kerja yang menuntut semakin tingginya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.

2.1.8 Hubungan Antar Variabel

1. Penyerapan tenaga kerja (PTK) terhadap pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam memberikan gambaran sejauh mana kondisi perekonomian dalam suatu daerah terjadi. Konsep pertumbuhan ekonomi klasik tidak terlepas dari permasalahan sosial ekonomi, dimana salah satunya adalah tenaga kerja (Skousen, 1998). Permasalahan tenaga kerja yang bermuara pada pengangguran dan tenaga kerja yang bekerja. Untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Boediono, 1982). Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan

perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arif, 2015).

2. Penyerapan tenaga kerja (PTK) terhadap investasi

Investasi bertujuan untuk memaksimalkan tingkat produksi yang akan menghasilkan output atau surplus. Investasi dapat mempengaruhi permintaan agregat dan kapasitas produksi secara nasional. Investasi merupakan kegiatan menanam modal pada bermacam kegiatan perekonomian dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Soelistyo, 2018). Semakin besar investasi yang didapat maka semakin tinggi pula pertumbuhan sektor perekonomian pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki yang dapat meningkatkan pendapatan bruto. Investasi memberikan kontribusi positif terhadap tingkat lapangan kerja. Tingkat investasi dan upah berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Investasi merupakan solusi yang sangat efektif untuk permasalahan ekonomi negara terutama bagi wilayah dengan susunan ekonomi yang berkembang (Rahman et al, 2016).

3. Penyerapan tenaga kerja (PTK) terhadap pendidikan

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Secara teori dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja. Sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan (Geminastiti, 2016). Maka, lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan. Akibat rendahnya tingkat investasi dan rendahnya tingkat kualitas sumber daya menyebabkan rendahnya tingkat permintaan tenaga kerja. Hal ini berlanjut dengan semakin tingginya lulusan sekolah yang menganggur. Bahkan ini juga berlaku bagi lulusan perguruan tinggi yang merupakan tenaga kerja terdidik. Hal ini lebih disebabkan kurangnya proyeksi pendidikan, dan proyeksi lapangan pekerjaan. Kebanyakan lembaga pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang kurang marketable, lebih sebagai worker dan bukan employers (Hasan, 2018).

4. Penyerapan tenaga kerja (PTK) terhadap tingkat upah

Masalah penyerapan tenaga kerja juga erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja (Lincoln, 2010). Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penyerapan tenaga kerja yang terjadi di pulau jawa merupakan gambaran bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Dengan mobilitas dan tingkat penduduk yang menjadikan pulau jawa sebagai indikator yang cukup baik dalam menilai perekonomian secara nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Buchari (2016) dengan variabel upah minimum, pendidikan dan tenaga kerja memberikan hasil bahwa upah minimum berpengaruh negatif, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi (2015) yang berjudul Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali dengan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja, investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida dan Deny Setiawan (2014) dengan variabel investasi dan tenaga kerja serta analisis regresi data panel menghasilkan bahwa investasi berpengaruh positif. Artinya, dengan meningkatnya investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan dan sebaliknya, jika investasi menurun

maka akan menurunkan kesempatan kerja. Pada tahun 2018 penelitian dilakukan oleh Desi Marlina Nurhayati yang berjudul Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2016 dengan hasil bahwa upah, pendidikan, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah Danie (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan alat analisis regresi linier berganda memberikan hasil bahwa upah, PDRB dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Setiawan A.A.S. Intan Prativi, Yuliarmi Ni Nyoman dan Marhaeni A.A.I.N. pada tahun 2020 yang berjudul *The Effect of Locally-Generated Revenue, Investment, and Education on Labor Absorption and Per Capita Income in Regencies/Cities of Bali Province, Indonesia*. dengan analisis teknik analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa Pendapatan daerah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Imam Buchari 2016	Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015	Upah Minimum, Pendidikan dan Tenaga Kerja	Regresi Data Panel	Upah minimum berpengaruh negatif, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur.
2.	Latri Wihastuti, Henny Rahmatullah 2018	Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa	PDRB, Upah Minimum dan Tenaga Kerja	Regresi Data Panel	Upah dan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. UMP bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3.	Ririn Rusniati, Sudarti, Atut Frida Agustin 2018	Pengaruh Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang	Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tenaga kerja	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

4.	Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, Deny Setiawan, 2014	Pengaruh Terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan	Investasi Penyerapan Tenaga Kerja	Investasi dan Tenaga Kerja	Regresi Data Panel	Investasi berpengaruh positif. Artinya, dengan meningkatnya investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan dan sebaliknya, jika investasi menurun maka akan menurunkan kesempatan kerja.
5.	I Gusti Agung Indradewa, Ketut Suardika Natha, 2015	Pengaruh dan Terhadap Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	PDRB, Upah Minimum, Inflasi dan Tenaga Kerja	Regresi Linier Berganda	Inflasi, PDRB, dan upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.
6.	Tika Citra Kumalasari 2019	Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017	Upah Minimum, Inflasi dan Tenaga Kerja	PDRB, Upah Minimum, dan Inflasi dan Tenaga Kerja	Regresi Data Panel	Upah, inflasi, PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah
7.	Desi Marlina Nurhayati 2018	Pengaruh Tingkat Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Terhadap Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2016	Upah Minimum, Pendidikan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja	Upah Minimum, Pendidikan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja	Regresi Linier Berganda	Upah, pendidikan, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
8.	Muhammad Nur Afiat	Pengaruh Ekonomi Terhadap	Pertumbuhan Terhadap	Pertumbuhan Ekonomi dan	Regresi Linier	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan

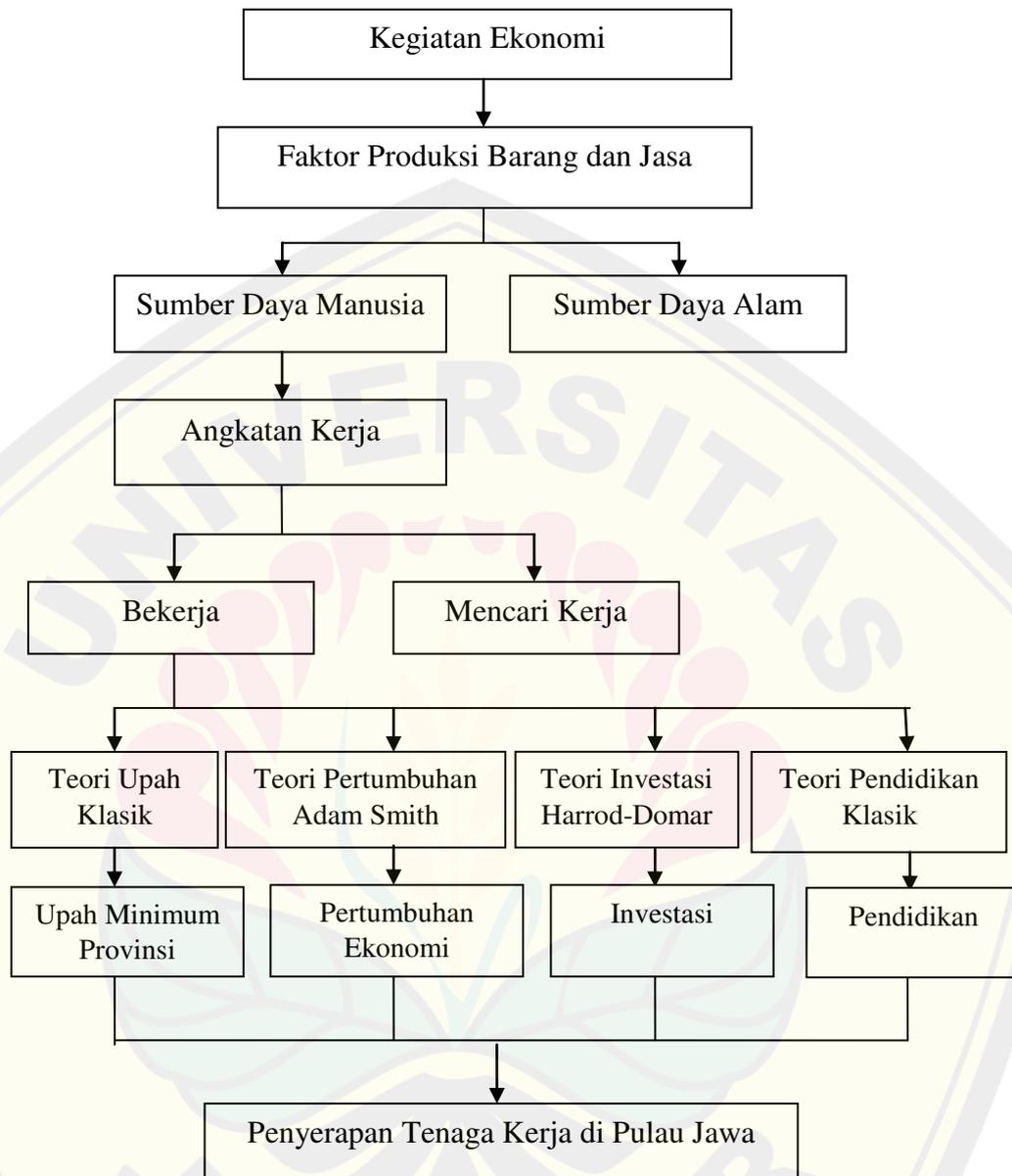
DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	2017	Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara	Tenaga Kerja Berganda		kesempatan kerja.
9.	Jinlan Ni, Guanxing Wang, Xianguo Yao 2014	Impact of Minimum Wage on Employment: Evidence From China	Upah Minimum dan Pekerjaan	Regresi Linier Berganda	Upah tidak memberikan berpengaruh buruk signifikan terhadap pekerjaan.
10.	Setiawan A.A.S. Intan Prativi, Yuliarmi Ni Nyoman, Marhaeni A.A.I.N. 2020	The Effect of Locally-Generated Revenue, Investment, and Education on Labor Absorption and Per Capita Income in Regencies / Cities of Bali Province, Indonesia.	Pendapatan, Investasi, Pendidikan dan Tenaga kerja	Teknik Analisis Jalur (<i>path analysis</i>)	Pendapatan daerah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ke sepuluh peneliti telah memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang telah diteliti sebelumnya, kemudian peneliti akan menggabungkan menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan faktor pertumbuhan ekonomi, investasi, upah dan pendidikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.



2.3 Kerangka Konseptual



Gambar: 2.3 Kerangka Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

Kegiatan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan atau kemakmuran dalam keberlangsungan hidup. Dalam proses produksi barang dan jasa diperlukan sumber daya manusia dalam

pengolahannya. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah mereka yang bekerja (tenaga kerja) untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah banyak.

Berbicara mengenai sumber daya manusia yaitu angkatan kerja, angkatan kerja merupakan mereka yang berumur 15 sampai dengan 64 tahun yang sudah memasuki usia kerja. Mereka yang bekerja itulah yang disebut tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor produksi yang merupakan unsur penting dan berpengaruh dalam pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi, oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi diperlukan peran manusia dimana manusia merupakan tenaga kerja.

Dari segi tenaga kerja terdapat empat faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dilihat dari upah minimum provinsi yang didukung oleh teori upah klasik yang mengatakan bahwa kenaikan upah akan menaikkan jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga permintaan akan kebutuhan hidup akan meningkat pula sehingga produsen akan menambah tenaga kerjanya untuk memenuhi permintaan terhadap produknya. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh adam smith melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi, setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Harrod Domar berpendapat bahwa investasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Investasi memiliki dua peranan penting untuk membawa pengaruh yang baik terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan yang sangat erat pada pendapatan negara. Semakin tinggi kegiatan investasi dilakukan maka semakin tinggi juga pendapatan negaranya. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang mana akan mempengaruhi penambahan permintaan kebutuhan masyarakat. Munculnya investasi akan mendorong kegiatan ekonomi yang baru dimana akan ada lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Hal ini akan menyebabkan adanya penyerapan tenaga kerja (Wahyuni, 2014).

Kemudian yang terakhir adalah pendidikan, Pendidikan juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang

maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas pendidikan akan mengakibatkan peningkatan persaingan dalam mencari pekerjaan. Dengan kondisi tersebut maka pemilihan tenaga kerja yang lebih berkualitas akan ditingkatkan yang diharapkan kedepannya dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan suatu negara. Dari keempat variabel tersebut akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dimana ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat maka perusahaan akan menambah tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap di Pulau Jawa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 2014 - 2021
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 2014 – 2021
3. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 2014 – 2021
4. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 2014 - 2021

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan dari penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penelitian ini atau menggunakan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif yang akan dijelaskan secara asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

3.1.2 Tempat, Waktu dan Unit Analisis Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa dengan 6 provinsi yakni Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi berada di Pulau Jawa kurang lebih 60% dari perekonomian Indonesia yang mengakibatkan tingkat tenaga kerja tinggi dan investasi berpusat di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada tahun 2014 hingga tahun 2021. Unit analisis dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja yang terserap, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, tingkat upah dan tingkat pendidikan.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini memiliki data *time series* dan data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data *time series*

Data *time series* adalah data yang digunakan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2021.

2. Data *Cross Section*

Data *Cross Section* adalah data yang digunakan sebanyak enam provinsi yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten.

Data yang digunakan dalam variabel ini yaitu:

- a. Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa
- b. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa
- c. Investasi di Pulau Jawa
- d. Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa
- e. Tenaga Kerja di Pulau Jawa

3.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai berbagai macam metode yakni

3.2.1 Analisis Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh variabel independen dipengaruhi oleh variabel dependen. Dengan menggunakan data panel yaitu data *time series* dan data *cross section* yang didapat dari data sekunder.

3.2.2 Analisis Panel Least Square (PLS)

Regresi *Partial Least Square* (PLS) univariat adalah sebuah model yang menghubungkan antara sebuah variabel respon Y dengan sekumpulan variabel prediktor X. Regresi PLS merupakan salah satu metode untuk mengatasi multikolinieritas yang dapat diperoleh melalui regresi sederhana maupun berganda dengan mengambil kesimpulan dari uji signifikansi (Gujarati, 2012). Uji signifikansi bertujuan untuk memilih variabel prediktor pembangun komponen PLS dan menentukan banyaknya komponen PLS yang terbentuk. Tujuan PLS adalah membentuk komponen yang dapat menangkap informasi dari variabel prediktor untuk memprediksi variabel respon. Data panel merupakan kombinasi antara data *cross section* dengan data *time series*. Persamaan data panelnya secara

teori dan diturunkan lebih spesifik terhadap variabel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Sehingga dalam model estimasi panel least square (PLS) sebagai berikut:

$$PTK_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 I_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 P_{it} + \beta_4 U_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja Pulau Jawa

I : Investasi

PE : Pertumbuhan Ekonomi

P : Pendidikan

U : Upah

β_{0i} : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien regresi variabel bebas

i : *Cross Section* / jenis provinsi

t : *Time Series* / waktu

e : *Error term*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis software Eviews 9. Alat ini berfungsi untuk membantu dalam proses pengolahan data penelitian yang berbentuk data panel. E-views merupakan alat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam melakukan estimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan (Gujarati, 2010), yaitu:

1. *Pooled Least Square (Common Effects)*

Pooled Least Square (Common Effects) merupakan metode yang menggunakan data regresi. Metode ini juga merupakan metode paling sederhana karena metode ini hanya menggabungkan data *time series* dan data *cross section*.

2. *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model diasumsikan bahwa persamaan regresi dianggap konstan. Model ini juga bisa menggunakan variabel dummy yang bisa disebut sebagai

Least Square Dummy Variables (LSDV). Teknik ini juga bisa digunakan untuk data *cross section* dan data *time series*.

3. *Random Effect Model*

Random Effect Model merupakan metode regresi yang menghitung eror. Metode random effect model ini memiliki keunggulan yaitu menghilangkan heterokedastisitas. Metode ini juga dapat memperhitungkan jika *error* akan berkorelasi dengan data *time series* dan data *cross section*.

3. 3 Pengujian Model

3.3.1 Uji Chow

Uji Chow berfungsi sebagai pemilihan antara model *Pooled Least Square* atau model *Fixem Effect Model* yang akan digunakan. Pengujian ini memiliki hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model *Pooled Least Square*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas memiliki nilai $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan metode akan digunakan adalah PLS (*Pooled Least Square*). Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya $\leq \alpha = 0,05$ maka nilai tersebut tidak diterima terhadap H_0 , sehingga model yang digunakan harus model *Fixed Effect*. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%.

3.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman berfungsi sebagai pemilihan antara model *Fixed Effect* atau model *Random Effect Model* yang akan digunakan. Pengujian ini memiliki hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas memiliki nilai $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan metode yang digunakan adalah REM (*Random Effect Model*). Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya $\leq \alpha = 0,05$ maka nilai tersebut akan tidak diterima terhadap H_0 sehingga model yang digunakan harus model *Fixed Effect Model*. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%.

3.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier berfungsi sebagai pemilihan antara model *Pooled Least Square* atau *Random Effect Model*. Pengujian ini memiliki hipotesa sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square (Common Effects)*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika nilai probabilitasnya memiliki nilai $> \alpha = 0,05$, maka H_0 akan diterima dan metode yang akan digunakan adalah *Pooled Least Square*. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya $< \alpha = 0,05$, maka nilai tersebut akan tidak diterima terhadap H_0 sehingga model yang harus digunakan adalah *Random Effect Model*. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%.

3.4 Uji Statistik

Dalam uji penelitian ini akan dilakukan uji statistik, yaitu:

3.4.1 Uji – F (Uji Simultan)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. uji F berfungsi sebagai alat pengujian yang melakukan hipotesa didalamnya. Hipotesa sebagai berikut:

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari tingkat signifikansi maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka akan ada pengaruh yang sangat besar dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.4.2 Uji – t (Uji Koefisien Regresi)

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang terjadi bisa menggunakan cara membandingkan nilai probabilitas dari setiap variabel dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Uji t-statistik mempunyai hipotesa sebagai berikut:

H_0 : tidak berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen

H_1 : berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen

Jika nilai probabilitas t-statistik $> 0,05$ maka H_0 akan diterima dan sebaliknya jika nilai probabilitas t-statistik $\leq 0,05$ maka H_0 akan ditolak. Pengujian ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 5%.

3.4.3 Koefisien Determinan R^2

Koefisien determinan R^2 berfungsi sebagai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dalam penelitian. Nilai koefisien determinan (R^2) berkisar antara angka nol dan angka satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 mendekati angka nol maka variabel independen dikatakan sangat kecil pengaruhnya. Jika nilai R^2 mendekati angka 1 maka variabel independen dikatakan sangat berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut ada penyimpangan di dalam model tersebut. Terdapat tiga uji asumsi klasik yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas. Uji asumsi klasik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk melihat korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan pada uji asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dengan model regresi. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,10 maka variabel independen tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas, tetapi jika nilai korelasi lebih dari 0,10 maka akan terjadi multikolinearitas.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual (gangguan) dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji park untuk

mendeteksi heteroskedastisitas. Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka model tersebut terindikasi adanya heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada variabel pengganggu yang memiliki distribusi tidak normal maupun normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang datanya berdistribusi normal atau hampir mendekati kategori normal. Cara mendeteksi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat nilai probabilitasnya lebih dari α yakni 5%.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian.

1. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) adalah jumlah penduduk yang terserap sebagai tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja di seluruh sektor di setiap Provinsi di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2014 – 2021 dinyatakan dalam jiwa.
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase yang diukur dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2014–2021 dengan satuan persen pertahun.
3. Investasi adalah jumlah keseluruhan penanaman modal baik dalam dan luar negeri yang ditanamkan kepada daerah di Pulau Jawa untuk dikembangkan menjadi pembangunan daerah. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2014–2021 dengan satuan persen.
4. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2014 – 2021 dengan satuan ribu rupiah.

5. Pendidikan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan rata-rata lama sekolah di seluruh wilayah Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2014 – 2021 dengan satuan tahun.

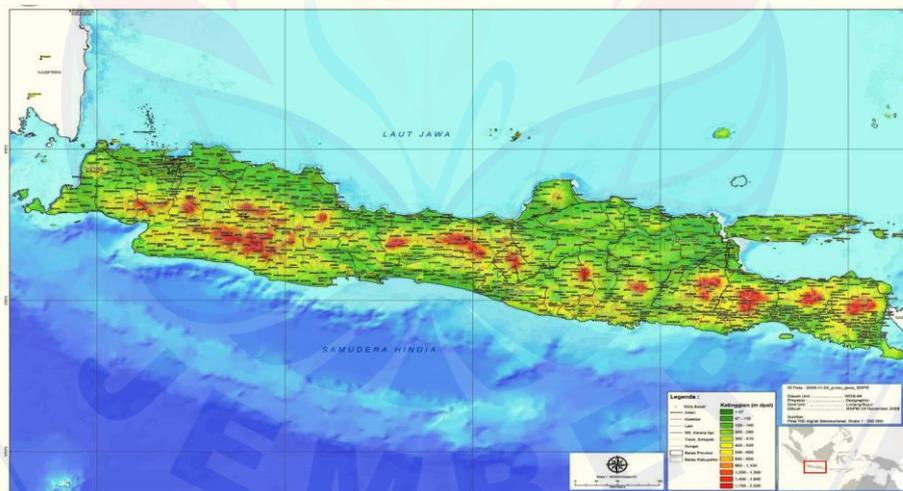


BAB 4. PEMBAHASAN

Pada bab 4 akan menjelaskan secara rinci mengenai penyerapan tenaga kerja (PTK) yang dipengaruhi oleh variabel investasi, pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat pendidikan dan upah. Penelitian berfokus pada beberapa jenis analisis statistik dan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode estimasi regresi data panel atau *panel least square* dengan paduan data *cross section* dan *time series*, dimana bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen dan variabel dependen.

4.1 Gambaran Umum Perekonomian Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk yakni 56,10% dari total penduduk Indonesia sebesar 272,23 juta (BPS, 2021). Pulau Jawa yang terbagi menjadi enam provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk yang melebihi setengah dari total penduduk Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terpusat di pulau jawa. Pulau jawa dengan luas daratan sebesar 128.297 Km² dan kordinat 113⁰48'10" – 113⁰48'26" BT dan 7⁰50'10" – 7⁰56'41" LS.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Pulau Jawa

(Sumber: www.onemap.esdm.go.id di akses 26 Desember 2021)

Pulau jawa yang merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan memberikan dampak pada persentasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Laporan Badan Pusat Statitika pada tahun 2020 bahwa sebaran PDB atau *product*

domestic bruto di pulau jawa sebesar 58,48% atau tumbuh 5,72% dimana total PDB secara nasional sebesar Rp. 14,9 ribu triliun (BPS, 2022). Kondisi ekonomi dengan PDB sebesar 58,48% menunjukkan bahwa perekonomian di semua provinsi pulau jawa mengalami pertumbuhan yang seragam dan dengan nilai yang tinggi. Hal tersebut ditunjang oleh pembangunan infrastruktur dan industri baru serta percepatan pembangunan lingkungan ekonomi yang baru (BPS, 2022).

4.1.1 Deskripsi Penyerapan Tenaga Kerja dan Kondisi Variabel Demografi di Pulau Jawa

Pulau jawa dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memberikan suatu permasalahan dan kebaikan tersendiri. Sebaran penduduk yang cenderung merata dipulau jawa sebagai bonus demografi berdampak pada penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja yang setiap tahun semakin bertambah namun tidak selaras dengan permintaan tenaga kerja yang ada setiap tahunnya. Pola penyerapan tenaga kerja yang berada di pulau jawa cenderung pada sektor industri dan pertanian. Dimana provinsi di pulau jawa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang bervariasi. Hal ini didasari pada kebijakan yang dilakukan oleh setiap provinsi untuk memberikan *multiplier effect* yang berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi. Dengan diversitas yang bervariasi, membuat penyerapan tenaga kerja di pulau jawa cenderung terpusat pada pusat-pusat kota yang berada di enam provinsi.

Tabel 4.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

Provinsi	Rata-Rata	Persentase (%)
Banten	246342	3.97
DKI Jakarta	206252	3.32
Jawa Barat	1353066	21.82
DI Yogyakarta	194913	3.14
Jawa Tengah	2040148	32.9
Jawa Timur	2159556	34.82
Jumlah	6200277	100

Sumber: Lampiran A, diolah

Berdasarkan tabel 4.1 diatas didapat bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 hingga 2021 terbesar berada di Provinsi Jawa Timur dengan persentase 34,82%. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari pemerintah

pusat mengenai penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berada di Provinsi Jawa Timur (Dewnas Kek, 2021). Kebijakan yang sama dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana kemudahan dalam melakukan investasi dan membenahan atau reformasi birokrasi yang semakin baik menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerja secara rata-rata pertahun sebesar 2,04 juta atau persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 32,9% per tahun (BPS Jateng, 2022). Untuk provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 3,14% selama 2014 hingga 2021 memberikan gambaran bahwa kualifikasi pekerjaan yang tersedia tidak cukup baik dalam permintaan tenaga kerja. Keadaan tersebut perlu dukungan dari semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja sehingga penawaran tenaga kerja yang tersedia beragam dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pola pembangunan ekonomi yang masif pada provinsi DI Yogyakarta belum memberikan dampak yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebijakan arah pembangunan yang cenderung fisik yakni mendekatkan faktor industri dengan faktor produksi sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah (Azzahra, 2021).

Tingkat penyerapan tenaga kerja di pulau jawa secara keseluruhan sudah menunjukkan bagaimana bonus demografi sangat berpengaruh pada permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang berada di pulau jawa harus diimbangi oleh perbaikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang semakin baik akan memberikan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditawarkan (Feriyanto, 2014). Peningkatan tersebut didapat salah satunya dengan pendidikan yang telah didapat oleh tenaga kerja baik secara formal atau informal. Tingkat pendidikan yang baik dan pelatihan *soft skill* berdampak pada lulusan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri baik dalam dan luar negeri sehingga penyerapan tenaga kerja semakin tinggi (Anjarwati, 2021).

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

Provinsi	Rata-Rata	Persentase (%)
Banten	8.45	15.97
DKI Jakarta	10.87	20.55
Jawa Barat	8.03	15.18
DI Yogyakarta	11.03	20.85
Jawa Tengah	7.21	13.63
Jawa Timur	7.29	13.78
Jumlah	52.88	100

Sumber: Lampiran A, diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pendidikan tertinggi berada pada Provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat pendidikan rata-rata 20,85%. Sebagai saah satu provinsi tujuan pendidikan di Indonesia, Provinsi Yogyakarta memiliki beberapa perguruan tinggi ternama yakni Universitas Gaja Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) serta perguruan tinggi lainnya. Lingkungan pendidikan yang cenderung terjaga mengakibatkan tingkat pendidikan di Provinsi Yogyakarta tertinggi di pulau jawa. Pada Provinsi DKI Jakarta, tingkat rata-rata pendidikan dari tahun 2014 hingga 2021 berada pada 10,87 atau 20,55% terhadap tingkat pendidikan pada provinsi lain di pulau jawa. Hal ini terjadi karena Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan merupakan pusat ekonomi Indonesia berdampak secara tidak langsung pada tingkat pendidikan tenaga kerja.

Pada Provinsi Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi penyangga dari Provinsi DKI Jakarta mempunyai rata-rata tingkat pendidikan sebesar 8,03 dan 8,45. Peningkatan pendidikan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Banten tidak terlepas *multipiler effect* yang diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga tingkat pendidikan yang diperlukan harus sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tingkat pendidikan yang cenderung berada pada pusat ekonomi dan pemerintahan memberikan gap yang cukup besar di antara satu daerah dengan daerah lainnya (Fattah, 2008). Distribusi pendidikan yang merata memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan dan penerapan

teknologi dalam perekonomian yang terbuka. Pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh setiap daerah menganut pada kebijakan masing-masing daerah. Dengan pendapatan masyarakat yang cukup maka tingkat pendidikan dalam suatu daerah semakin membaik (Julianto, 2019). Pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tingkat pendidikan sebesar 13,63% dan 13,78% dari total rata-rata pendidikan yang berada di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Tingkat pendidikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa menyebabkan tingginya pengangguran terbuka yang berada di kedua provinsi tersebut. Penyerapan tenaga kerja dengan karakteristik pendidikan rendah cenderung memiliki upah atau pendapatan yang rendah pula dan berbanding terbalik dengan tenaga kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi sehingga upah yang didapat juga tinggi (Edy, 2009).

Pendapatan masyarakat yang berada di enam provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki perbedaan yang cukup jauh. Hal ini didasarkan pada tingkat upah yang berlaku pada setiap provinsi.

Tabel 4.3 Tingkat Upah di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

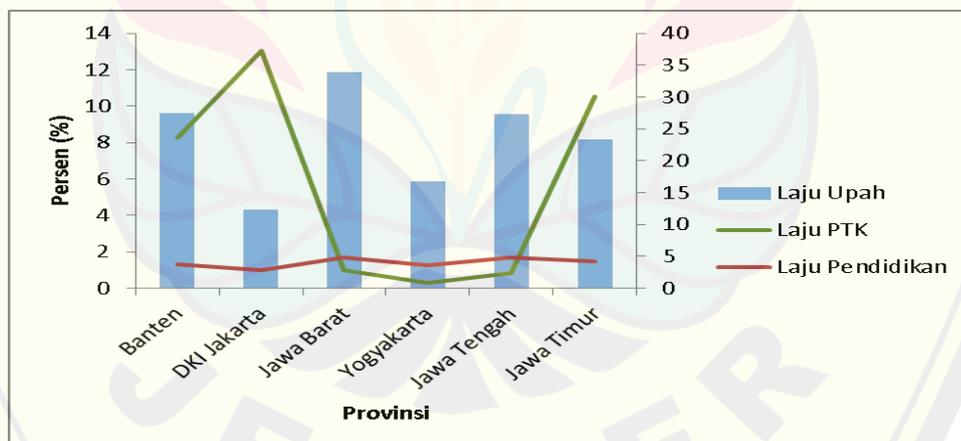
Provinsi	Rata-Rata	Persentase (%)
Banten	2590150	19.68
DKI Jakarta	3449733	26.21
Jawa Barat	2311246	17.56
DI Yogyakarta	1249733	9.49
Jawa Tengah	1759851	13.37
Jawa Timur	1800085	13.67
Jumlah	13160798	100

Sumber: Lampiran A, diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan tingkat rata-rata upah yang diberikan kepada pekerja di enam provinsi yang berada di pulau jawa. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 hingga 2021 tingkat upah yang berlaku sebesar 26,21% atau Rp. 3.449.733 hal ini terjadi karena biaya hidup di Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi sehingga berdampak pada tingginya upah pekerja yang diterima oleh pekerja setiap tahunnya. Tingkat upah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar Rp. 2.311.246 dan Provinsi Banten sebesar Rp. 2.590.150 atau

19,4% dan 21,74% dimana kedua provinsi tersebut hampir memiliki tingkat upah yang sama. Hal tersebut terjadi karena letak wilayah yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sehingga tingkat upah yang diterapkan mengadaptasi dari upah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai provinsi penyangga dengan banyaknya industri yang berada di kedua provinsi tersebut (Purba et.al, 2016).

Sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur tingkat upah yang berlaku dengan rata-rata pada tahun 2014 hingga 2021 sebesar Rp. 1.759.851 dan Rp. 1.800.085 atau 14,77% dan 15,11%. Tingkat upah yang cenderung rendah tersebut terjadi karena biaya hidup yang cukup murah dan kurangnya industri sebagai pendorong tingkat upah. Disisi lain, rendahnya tingkat upah di kedua provinsi disebabkan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani atau pekebun sehingga tingkat upah yang diterima masih rendah (Hartanto & Masjkuri, 2017). Pada Provinsi DI Yogyakarta upah rata-rata pada tahun 2014 hingga tahun 2021 sebesar 9,49% dimana upah tersebut adalah nilai terkecil dari semua provinsi yang berada di pulau jawa. Upah minimum yang cenderung kecil di Provinsi DI Yogyakarta diakibatkan oleh tingkat inflasi yang cenderung stabil dan rendah (Wihastuti, 2018).



Gambar 4.2 Perkembangan Upah, Penerimaan Tenaga Kerja (PTK) dan Tingkat Pendidikan di Enam Provinsi Pulau Jawa (Sumber: Lampiran A, diolah)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas terlihat bahwa perkembangan laju upah di enam provinsi pulau jawa tertinggi didapat oleh Provinsi Jawa Barat dengan 33,8% dan terendah pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 12,24%. Pada laju penerimaan tenaga kerja (PTK) tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta

sebesar 13,06% dan terendah terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,3%. Untuk besaran tingkat pendidikan tertinggi didapat oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,67% dan terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,97%. Secara umum, tingkat laju pada setiap variabel penelitian menunjukkan gap yang cukup tinggi di antara provinsi di pulau jawa.

Pencapaian terbaik secara penyerapan tenaga kerja (PTK) yang terjadi di enam provinsi di pulau jawa yang merupakan effect dari tingginya upah dan tingkat pendidikan secara akumulatif terjadi pada Provinsi Jawa Timur. Indikator tersebut didapat dengan mengacu pada konsep asumsi neoklasik tentang *marginal product of labor* (MPL) yang menyatakan bahwa pertambahan upah minimum harus sejalan dengan peningkatan produktivitas individu dengan adanya peningkatan pada skil dan kompetensi serta pengetahuan yang lebih baik (Blanchard, 2012). Teori neoklasik juga memberikan gambaran dan konsep bahwa penyerapan tenaga kerja pada wilayah dengan upah tinggi mengharuskan memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi pula terhadap pekerjaa yang akan dijalani, artinya faktor capital atau pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan upah dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi (Hasan & Aziz, 2018).

4.1.2 Interaksi Penyerapan Tenaga Kerja pada Variabel Makroekonomi di Pulau Jawa

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar nilai produk domestik regional bruto (PDRB) yang berada di enam provinsi pulau jawa yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Pendapatan regional suatu provinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan itu dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil) atau konsumsi masyarakat secara umum, kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disertai kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan semacam ini merupakan kenaikan pendapatan yang semu (tidak riil) (Charysa, 2013). Dalam tabel 4.4 dapat di lihat bahwa pertumbuhan

ekonomi di enam provinsi di pulau jawa pada rentang tahun 2014 hingga 2021 cenderung stagnan atau tetap dengan nilai rata-rata pada 5 persen.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

Provinsi	Rata-Rata	Persentase (%)
Banten	5.55	16.61
DKI Jakarta	5.99	17.93
Jawa Barat	5.31	15.89
Yogyakarta	5.65	16.91
Jawa Tengah	5.32	15.92
Jawa Timur	5.58	16.7
Jumlah	33.4	100

Sumber: Lampiran A, diolah

Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi yang berada di pulau jawa memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,99%, dimana hal ini dicapai dengan meningkatnya penerimaan daerah dengan semakin tingginya harga dan aset properti yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Komposisi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang ditopang oleh pengenaan pajak daerah dan pendapatan daerah memberikan dampak besar pada nilai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi selaras dengan pendapatan per kapita penduduk di Provinsi DKI Jakarta (Dimas, 2009). Untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten yang merupakan wilayah penyangga dari Provinsi DKI Jakarta memiliki dampak yang cukup besar, hal ini terlihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut yang berada pada 5,31% dan 5,55%. Selain sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara, wilayah tersebut termasuk dalam wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dan adanya industri manufaktur yang cukup banyak (Maisaroh, 2018). Pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan rentang tahun 2014 hingga 2021 sebesar 5,32% dan 5,58%. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung stabil karena stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi yang cukup rendah serta capaian yang didukung oleh tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk mendorong dan mengevaluasi kebijakan terhadap pangan dan ketersediaan bahan pokok kebutuhan sehari-hari sehingga inflasi dapat terkendali secara baik (Indradewa, 2018). Dukungan sektor pertanian dan perkubunan

merupakan kunci dari stabilitas pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut pada 5% pertahun (Buana, 2018). Sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 hingga 2021 sebesar 5,65% dengan dukungan sektor pariwisata dan pertanian menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta (Azzahra, 2021).

Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi secara total di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021 sebesar 5,56% memberikan kepastian pada sektor makroekonomi lain. Investasi yang merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Wahyono, 2021).

Tabel 4.5 Nilai Investasi di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

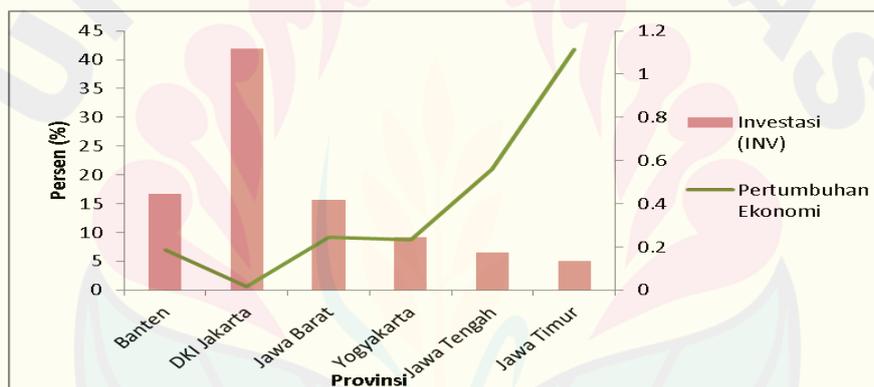
Provinsi	Rata-Rata	Persentase (%)
Banten	17838.3	8.66
DKI Jakarta	39856.56	19.35
Jawa Barat	42238.27	20.15
Yogyakarta	39856.56	19.35
Jawa Tengah	23109.22	11.22
Jawa Timur	42988.05	20.87
Jumlah	205887	100

Sumber: Lampiran A, diolah

Dengan konsep investasi sebagai salah satu instrumen dalam variabel ekonomi, setiap investasi memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja dan menjadikan suatu wilayah lebih produktif. Pulau jawa sebagai salah satu pulau dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru (Rahman, 2016). Keadaan investasi di pulau jawa yang terbagi menjadi enam yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki nilai rata-rata investasi yang cukup besar yakni sebesar 20,87% dan 20,15% terhadap total investasi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Tingginya nilai investasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat tidak terlepas dari berlakunya paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhan investasi di daerah (Buana, 2018). Paket

kebijakan ekonomi yang selanjutnya di implimentasikan dengan infrastruktur yang semakin baik, maka kepastian dan iklim investasi serta biaya produksi hingga pengiriman barang dan jasa semakin lebih murah (Kemenko Perekonomian, 2017). Pada Provinsi Banten, Jawa Tengah dan DKI Jakarta serta DI Yogyakarta dengan nilai rata-rata investasi masing-masing sebesar 8,66%, 11,22%, 19,35% dan 19,35% terhadap total investasi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Rendahnya nilai investasi di empat provinsi tersebut diakibatkan masih kurangnya implementasi paket kebijakan ekonomi untuk stimulus investasi dan masih rendahnya nilai indeks kemudahan investasi (Maisaroh, 2018). Disisi lain, kepastian hukum, birokrasi yang kurang efektif dan efisien serta perizinan yang masih berbelit-belit merupakan persoalan klasik yang masih ada dan berkembang di enam provinsi tersebut.



Gambar 4.3 Perkembangan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Enam Provinsi Pulau Jawa (Sumber: Lampiran A, diolah)

Berdasarkan gambar 4.3 diatas terlihat bahwa laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di enam provinsi pulau jawa mengalami gap yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya laju investasi di DKI Jakarta selama 2014 hingga 2021 yang sebesar 41,92% dimana nilai tersebut didapat dari masuknya modal investasi dalam negeri dalam pembangunan properti yang semakin tinggi. Sedangkan laju investasi terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 5%, dengan laju investasi yang rendah namun penanaman modal yang cukup besar mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 1,11% dibandingkan provinsi lain yang

masih berada dibawah satu persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari implementasi kebijakan paket ekonomi yang memberikan kemudahan terhadap investasi dan pemberlakuan perizinan satu pintu pada setiap kabupaten/kota (Dewi, 2017). Disisi lain, laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,015% dimana nilai tersebut diakibatkan oleh stagnasi pembangunan infrastruktur publik dan kelancaran pengiriman barang dan jasa serta kurangnya kepastian hukum dan stabilitas politik yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta (Purba, 2016).

4.2 Hasil Olah Data

4.2.1 Pemilihan Model Terbaik

Sebelum melakukan regresi pada data panel, terlebih dahulu melakukan pengujian model untuk memilih model terbaik pada data panel yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier dalam menentukan model yang terbaik.

1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk mencari model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Hasil uji chow dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Statistic	d.f.	Prob.	Effects Test
54.735076	(5,38)	0.0000	Cross-section F
101.010050	5	0.0000	Cross-section Chi-square

Sumber: Lampiran C, diolah

Pada tabel diatas bahwa hasil uji chow menunjukkan probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa *fixed effect model* merupakan model terbaik, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui apakah benar bahwa *fixed effect model* lebih baik dibandingkan dengan *random effect model* (REM). Maka dari itu perlu dilakukan Uji Hausman yang juga bertujuan

untuk memilih model terbaik diantara *fixed effect model* dan *random effect model*. Hasil uji hausman pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.577584	4	0.0482

Sumber: Lampiran B, diolah

Berdasarkan hasil estimasi Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas *chi-square* sebesar 0,0000 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 atau 5%. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak dengan begitu model terbaik adalah *fixed effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Hasil Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dilakukan apakah model *cammon effect model* dan *random effect model* yang terpilih setelah *fixed effect model* yang merupakan model terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 4.8 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	112.2665 (0.0000)	3.618869 (0.0571)	115.8854 (0.0000)

Sumber: Lampiran D, diolah

Berdasarkan hasil estimasi dengan Uji Lagrange Multiplier didapat bawah nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka model yang terpilih dalam Uji Lagrange Multiplier adalah *random effect model*.

4.2.2 Analisis Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Penelitian ini menggunakan model sesuai dengan hasil yang didapatkan dari melakukan uji chow dan uji hausman. *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu investasi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah terhadap variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja (PTK). Dengan nilai *p-value* yang dibandingkan pada nilai signifikansi sebesar nilai alpha 0,05 atau 5%. Berikut hasil estimasi data dengan menggunakan regresi *Fixed Effect Model* (FEM):

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.35745	3.062096	4.688766	0.0000
LOG(I)	-0.112929	0.088592	-1.274700	0.0102
LOG(PE)	0.009273	0.029698	0.312250	0.7566
LOG(P)	-0.012036	1.429643	-0.008419	0.9933
LOG(U)	0.173226	0.137686	1.258125	0.0260
R-squared		0.970015		
Adjusted R-squared		0.962913		
F-statistic		136.5870		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Sumber: Lampiran E, diolah

Berdasarkan hasil estimasi nilai dengan model *fixed effect model* didapat bahwa terdapat pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Secara model persamaan, maka nilai yang didapat sebagai berikut:

$$PTK = 14.35745 - 0.112929 I + 0.009273 PE - 0.012036 P + 0.173226 U + e$$

Hasil model persamaan dengan estimasi *fixed effect model* diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta α adalah 14.35745 artinya nilai penyerapan tenaga kerja (PTK) akan mengalami kenaikan sebesar 14.35745 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
2. Nilai koefisien investasi (I) sebesar -0.112929 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sektor investasi sebesar satu satuan maka nilai dari penyerapan tenaga kerja (PTK) menurun sebesar -0.112929 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
3. Nilai koefisien pada pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0.009273 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sektor pertumbuhan ekonomi sebesar satu satuan maka nilai dari penyerapan tenaga kerja (PTK) meningkat sebesar 0.009273 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
4. Nilai koefisien dari tingkat pendidikan (P) sebesar -0.012036 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sektor tingkat pendidikan sebesar satu

satuan maka nilai dari penyerapan tenaga kerja (PTK) menurun sebesar - 0.012036 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

5. Nilai koefisien dari upah (U) sebesar 0.173226 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada sektor upah sebesar satu satuan maka nilai dari penyerapan tenaga kerja (PTK) meningkat sebesar 0.173226 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

4.2.3 Uji Statistik

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dalam analisis ini dimaksud untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh parsial antara variabel independen yang meliputi investasi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah terhadap variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja (PTK). Dalam pengujian uji t terdapat syarat atau kriteria pengujian yaitu apabila probabilitas t hitung sebesar 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan apabila nilai probabilitas t hitung sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan jika terjadi hal seperti itu maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan hasil pengujian analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(I)	-0.112929	0.088592	-1.274700	0.0102
LOG(PE)	0.009273	0.029698	0.312250	0.7566
LOG(P)	-0.012036	1.429643	-0.008419	0.9933
LOG(U)	0.173226	0.137686	1.258125	0.0260

Sumber: Lampiran E, diolah

Berdasarkan hasil Uji t (Uji Parsial) menunjukkan pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan hasil sebagai berikut:

1. Variabel investasi (I) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0102 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05 maka variabel investasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
2. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dengan nilai probabilitas sebesar 0.7566 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05 maka variabel

PE memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).

3. Variabel tingkat pendidikan (P) dengan nilai probabilitas sebesar 0.9933 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05 maka variabel tingkat pendidikan (P) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
4. Variabel upah (U) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0260 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0,05 maka variabel upah (U) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).

2. Uji F Statistik

Uji F ini secara simultan merupakan uji hipotesa secara gabungan. Dalam hal ini untuk mengetahui hubungan penyerapan tenaga kerja, investasi, PDRB, pendidikan dan upah. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas Fhitung lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, nilai uji f statistik sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F Statistik

R-squared	0.970015
Adjusted R-squared	0.962913
F-statistic	136.5870
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Lampiran E, diolah

Berdasarkan hasil dari analisis pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 0.05 maka dengan hal ini berarti bahwa investasi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai yang menunjukkan besar variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen. Dimana nilai R^2 berada pada 0 sampai dengan 1, yang berarti nilai R^2 semakin mendekati nilai 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen semakin besar memengaruhi

variabel dependen begitupun sebaliknya jika nilai (R^2) semakin kecil mendekati 0 maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.970015
Adjusted R-squared	0.962913
F-statistic	136.5870
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Lampiran E, diolah

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai dari R^2 sebesar 0.948023 atau 97,00%. Dimana nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel dependen yakni PTK atau penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh variabel invesasti, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah sebesar 97,00%. Dengan pengaruh variabel independen sebesar 97,00% maka nilai sisa sebesar 3,00% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakakah terdapat hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Gujarati, 2012). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi terbebas dari multikolinearitas jika besaran nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 (Gujarati, 2012).

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

	I	PE	P	U
I	1	-0.0974458349	0.1408210346	0.4645877665
PE	-0.0974458349	1	-0.0563553303	-0.2669933797
P	0.1408210346	-0.0563553303	1	0.6142191584
U	0.4645877665	-0.2669933797	0.6142191584	1

Sumber: Lampiran F, diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, maka mendapatkan hasil nilai koefisien dari variabel-variabel bebas yang menunjukkan

bahwa tidak adanya multikolinearitas, karena nilai koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil dari 0,10 atau 10%.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat dalam model regresi ketidaksamaan variance dari nilai residual yang terjadi pada kontrol model pertama ke kontrol model lainnya. Dengan asumsi nilai dari heteroskedastisitas menolak pada tingkat $\alpha = 5\%$. Pada penelitian ini, hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.235199	0.127726	-1.841437	0.0725
I	-2.43E-07	7.59E-07	-0.319532	0.7509
PE	-0.001115	0.009646	-0.115595	0.9085
P	0.061517	0.016862	3.648230	0.0607
U	-0.054530	0.023554	-2.315145	0.0754

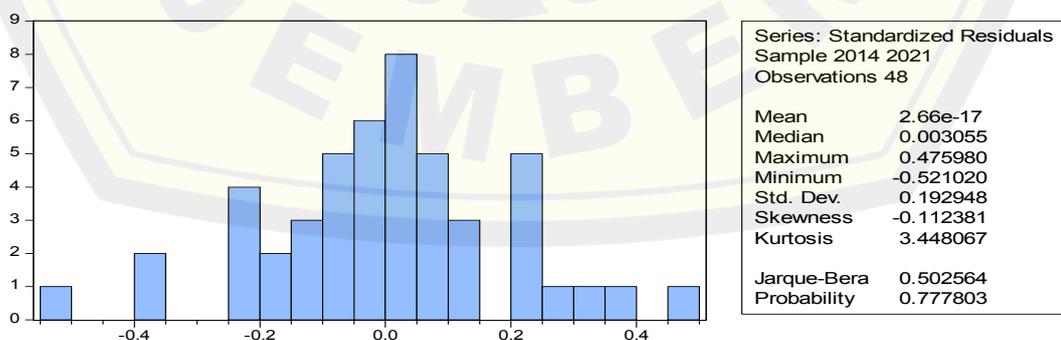
Sumber: Lampiran G, diolah

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas dari signifikansi variabel lebih dari nilai alpha sebesar 0,05, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel dalam model memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan baik apabila hasil dari uji normalitas pada nilai *probabilitas* lebih besar dari taraf signifikansi 5% dan berbanding terbalik jika nilai dari *probabilitas* kurang dari 5% takni data tidak berdistribusi normal. Pada penelitian ini, nilai uji normalitas sebagai berikut:

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Lampiran H, diolah

Berdasarkan gambar diatas bahwa dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test* untuk melihat apakah data pada setiap variabel berdistribusi normal. Dengan nilai dari probabilitas sebesar 0,777803 atau lebih besar dari nilai alpha 5% artinya model dalam regresi berdistribusi normal.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada Tahun 2014-2021. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Upah serta untuk variabel dependen yakni Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

4.3.1 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) disapat bahwa adanya hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Hal ini terlihat dari hasil uji-t yang diketahui bahwa investasi menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05 terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan nilai investasi di enam provinsi Pulau Jawa berpengaruh langsung secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dampak masuknya modal investasi baik dalam bentuk portofolio atau investasi langsung memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian suatu wilayah.

Dampak dari tingginya aliran modal ke dalam suatu wilayah yakni terbentuknya lapangan kerja baru dan membuka pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan investasi yang beragam membentuk ekosistem ekonomi baru yang lebih maju dan terbuka sehingga penyerapan tenaga kerja lebih beragam. Kebijakan pemerintah pusat yang diinterpretasikan terhadap kemudahan investasi melalui paket kebijakan ekonomi yang mendukung terbukanya investasi dan kemudahan dalam melakukan perizinan. Investasi yang selalu diharapkan di setiap daerah merupakan investasi yang berbentuk padat karya. Investasi pada sektor padat karya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menimbulkan kesejahteraan pada

masyarakat dan berujung pada stabilitas perekonomian suatu wilayah. Disisi lain, stabilitas politik dan kepastian hukum terhadap kemudahan investasi memberikan dampak pada investasi langsung sehingga penyerapan tenaga kerja baik yang terdidik dan non terdidik semakin tinggi.

Teori investasi yang dikemukakan oleh Jhingan (2004) menyatakan bahwa hubungan investasi terhadap tenaga kerja bersifat positif, artinya semakin tinggi nilai investasi yang berada pada suatu wilayah baik berupa investasi pada karya atau pada modal memberikan dampak pada sektor tenaga kerja yang terserap. Kombinasi kebijakan yang diterapkan dalam mendukung investasi perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di semua daerah dan tidak hanya berfokus pada wilayah pulau jawa. Konsep desentralisasi yang sudah ada perlu dilakukan *refocusing* terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah (Wahyono, 2021). Konsep inestvai menurut mahzab new keynesian menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan *capital inflow* yang masuk ke dalam suatu wilayah sehingga tujuan dan arah pembangunan ekonomi semakin baik dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai (Todaro, 2003).

Terbukanya lapangan pekerjaan yang semakin tinggi akibat masuknya investasi sesuai dengan tujuan dari paket kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Mulai dari paket kebijakan ekonomi jilid satu yang membahas kemudahan investasi dan kepastian hukum serta adanya kemudahan membayar pajak hingga paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang berisi tentang adanya *tax holiday*, relaksasi daftar negatif investasi dan memperkuat pengendalian devisa serta pemberian insentif perpajakan bagi investor (Dewi et.al, 2017). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Buana *et.al* (2018) dengan hasil bahwa investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta memberikan dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di pulau jawa.

4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) disapat bahwa tidak adanya hubungan antara pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Hal ini terlihat dari hasil uji-t yang diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05 terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di enam provinsi pulau jawa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dimana faktor pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil tetapi tidak didukung oleh perkembangan sektor industri yang lebih padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja kurang maksimal. Melihat hasil tersebut mengungkapkan bahwa kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi yang berada di enam provinsi pulau jawa. Kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sektor yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi (Indradewa, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang pada setiap tahun mengalami kenaikan yang masih kurang dalam mendorong penyerapan tenaga kerja yang berada di pulau jawa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan terbukanya sektor industri yang nantinya membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja (Pujoalwanto, 2014). Merujuk pada konsep tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif. Sumarsono (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya memberikan stimulus yang tidak berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. *Multiplier effect* yang diberikan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka berdampak secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa besarnya alokasi sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien merupakan awal dari adanya pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal baik fisik dan biaya produksi (modal kerja) dibutuhkan untuk membangun ekonomi yang tangguh dan menjaga perekonomian tetap stabil (Sukirno, 2003). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Danire (2017) yang menyatakan bahwa

penyerapan tenaga kerja dipengaruhi secara tidak signifikan oleh besarnya upah dan tingkat pendidikan sedangkan pada pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah dan tingkat pendidikan pada penelitian tersebut bersifat *dummy* dan terjadi adanya hubungan kausalitas yang searah.

4.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial atau uji-t yang diketahui bahwa tingkat pendidikan menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05 terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan nilai tingkat pendidikan di enam provinsi pulau jawa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kinerja sektor pendidikan merupakan sesuatu hal yang sulit untuk diarahkan dalam mendukung tujuan pemerintah untuk pemerataan tingkat pendidikan bagi tenaga kerja (Geminastiti, 2016).

Tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah dan pengaruh lingkungan sosial budaya yang masih kuat berdampak pada masyarakat yang masih acuh terhadap pentingnya pendidikan formal atau non formal. Pulau jawa yang merupakan pulau dengan tingkat penduduk tertinggi di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang kurang terutama pendidikan dasar. Faktor utama tidak meratanya pendidikan adalah besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh seseorang individu untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Fattah, 2008). Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berakibat pada penyerapan tenaga kerja yang berada di enam provinsi pulau jawa. Kecenderungan besarnya tenaga kerja yang berada di pulau jawa yang masih berada pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) sehingga penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan di pulau jawa terpenuhi. Besarnya pembangunan industri dan infrastruktur membuat pasar tenaga kerja menyediakan pekerja yang mempunyai kompetensi kurang atau

tenaga kasar sehingga penyerapan tenaga kerja masih terjaga atau tinggi (Anjarwati, 2021). Hasan dan Aziz (2018) menyatakan bahwa konsep pendidikan pada saat ini bukan hanya diberikan oleh institusi pendidikan dari pemerintah, namun dapat diperoleh dari institusi swasta yang memberikan pembelajaran langsung dan efektif dalam meningkatkan *soft skill* tenaga kerja dengan sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti *et.al*, (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang terjadi di pulau jawa cenderung tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 hingga 2018. Disisi lain, hasil penelitian ini juga diperkuat dengan konsep pendidikan non formal yang dikemukakan oleh Moore bahwa pendidikan non formal merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan dari luar sistem sekolah yang ada. Pendidikan non formal ini yang menjembatani gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang terjadi saat ini (Edy, 2009).

4.3.4 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil estimasi menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) disapat bahwa adanya hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi di pulau jawa pada tahun 2014 hingga 2021. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial atau uji-t yang diketahui bahwa tingkat upah menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05 terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan nilai tingkat upah di enam provinsi pulau jawa berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dampak pada besarnya upah yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yakni pada peningkatan kinerja tenaga kerja dalam memenuhi keinginan perusahaan. Artinya semakin tinggi upah yang diberikan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja maka semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja yang didapat oleh perusahaan (Prasetya, 2015).

Indikator yang memperlihatkan bahwa pengaruh upah signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja adalah bertambahnya penawaran tenaga kerja yang berada di pasar tenaga kerja menyebabkan perusahaan

menentukan upah minimum rendah untuk menyerap tenaga kerja. Melimpahnya penawaran kerja yang terjadi di pulau jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia berdampak pada turunnya upah minimum yang ditetapkan oleh perusahaan (Sulistiawati, 2012). Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan untuk upah harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi. Pengenaan upah minimum yang telah dilakukan oleh pemerintah harus lebih mendorong pada perusahaan untuk membuka pekerjaan yang lebih banyak sehingga penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Disisi lain, kebijakan pemberian pajak yang terlalu tinggi membuat perusahaan tidak membuka pekerjaan baru sehingga penyerapan tenaga kerja terganggu. Kebijakan pemerintah dalam kemudahan usaha dan pengenaan pajak yang rendah serta kemudahan dalam pembayaran payak, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak (Wihastuti, 2018).

Keadaan perekonomian yang tidak stabil berdampak pada produktivitas perusahaan sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan mayoritas tenaga kerja di pulau jawa masih berada pada tingkat sekolah menengah atas sehingga penyerapan tenaga kerja terpusatkan pada sektor yang industri padat karya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Wihastuti (2018) yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang berada di pulau jawa. Namun disisi lain, penelitian ini tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Skousen (2009) yang menyatakan bahwa dalam penentuan upah harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yakni inflasi dan indeks gini (*gini ratio*). Penyerapan tenaga kerja yang tinggi harus diikuti oleh kepastian hukum dan pemberian upah yang jelas sehingga tenaga kerja yang bekerja akan secara maksimal dan meningkatkan produktivitas perusahaan dengan *multiplier effect* pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.

BAB 5. PENUTUP

Pada bab 5 akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif pada bab 4 dalam penelitian ini. Hasil analisis yang telah diperoleh pada bab sebelumnya akan dipergunakan untuk memberikan alternatif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini melalui perbandingan dari teori, empiris dan hasil analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi data panel, adalah sebagai berikut:

1. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi pulau jawa pada tahun 2014-2021. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan metode *panel least square* (PLS) yang mana investasi berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Bahwa dampak masuknya modal investasi baik dalam bentuk portofolio atau investasi langsung memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian suatu wilayah.
2. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi pulau jawa pada tahun 2014-2021. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan metode *panel least square* (PLS) yang mana pertumbuhan ekonomi berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terkonsentrasi dengan kecenderungan padat modal sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja terganggu. Dimana faktor pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil tetapi tidak didukung oleh perkembangan sektor industri yang lebih padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.
3. Pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi pulau jawa pada tahun 2014-2021. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan metode *panel least square* (PLS) yang mana pendidikan tidak berdampak pada penyerapan

tenaga kerja. Efek pada dunia pendidikan terjadi adanya perbedaan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah dan pengaruh lingkungan sosial budaya yang masih kuat berdampak pada masyarakat yang masih acuh terhadap pentingnya pendidikan formal atau non formal.

4. Upah memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di enam provinsi pulau jawa pada tahun 2014-2021. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan metode *panel least square* (PLS) yang mana upah berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Bahwa dengan perubahan yang terjadi menyebabkan pada besarnya upah yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yakni pada peningkatan kinerja tenaga kerja dalam memenuhi keinginan perusahaan.

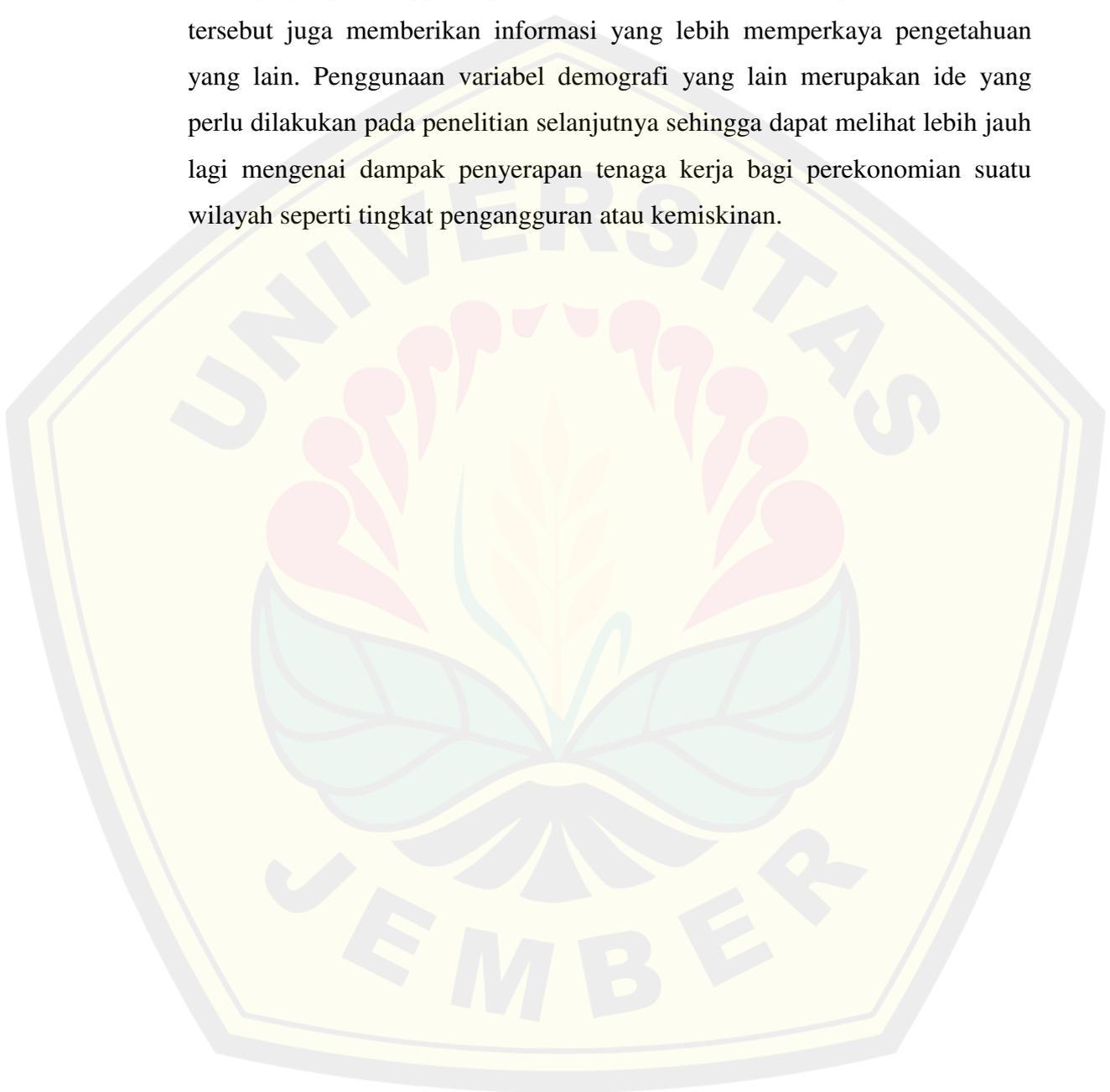
5.2 Saran

Berdasarkan analisis serta kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Penyelarasan tujuan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk memudahkan masuknya investasi ke dalam suatu daerah. Kemudahan investasi, kepastian hukum dan stabilitas ekonomi perlu dijaga agar investasi yang sudah masuk tidak kembali keluar. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam memperoleh pekerjaan semakin mudah. Pembangunan infrastruktur yang masif harus terus dilanjutkan sehingga biaya produksi perusahaan semakin rendah dan dapat membuka investasi baru.
2. Kebijakan pemerintah dalam menentukan tingkat upah bagi pekerja harus sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Indikator makroekonomi berupa tingkat inflasi dan suku bunga acuan perbankan menjadi salah satu instrumen dalam penentuan tingkat upah bagi pekerja. Bertambahnya tingkat upah setiap tahun mampu di elaborasi oleh tenaga kerja untuk meningkatkan skill dan pengetahuan sehingga produktivitas perusahaan bertambah.
3. Diharapkan bahwa tenaga kerja mampu meningkatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan soft skill serta pelatihan-pelatihan khusus

yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Tenaga kerja diharapkan mampu berinovasi dan memiliki wawasan luas yang nantinya berguna dalam memperoleh pekerjaan.

4. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan menggunakan data yang lebih panjang sehingga dapat memberikan diversitas yang lebih baik. Hal tersebut juga memberikan informasi yang lebih memperkaya pengetahuan yang lain. Penggunaan variabel demografi yang lain merupakan ide yang perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya sehingga dapat melihat lebih jauh lagi mengenai dampak penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian suatu wilayah seperti tingkat pengangguran atau kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Leni & Juliprijanto, Whinarko. 2021. Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10 No. 03
- Arif, B. & Made, H, U. 2015. Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol 4, No 10 Hal : 1219-1246.
- Azzahra, Syafilla Roza. 2021. Analisis Faktor Pengaruh Penyebab Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan Klassen*. Vol. 01. No. 02 pp 135-148
- Badan Pusat Statistik. 2022. Tenaga Kerja.
2022. Upah Minimum Provinsi.
2022. Rata-Rata Lama Sekolah. *Publikasi*.
2022. Produk Domestik Regional Bruto.
- Blanchard, O. 2012. *Macroeconomics*. London: Pearson Prentice-Hall.
- Boediono. 1982. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Buana, et.al. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. Vol. 04 No. 02
- Buchari, I. 2016. Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *Jurnal EKSIS Universitas Negeri Jakarta*. Vol. 11. No 1
- Charysa, Ninda N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 02 No. 04
- Cushway, Barry. 2002. *Human Resources Management*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Danie, D. 2017. Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *E-Jurnal STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb*. Vol 14. No 2. Hal : 332-354.
- Dewi, et.al. 2017. Reaksi Pasar Atas Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi X Tentang Daftar Negatif Investasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 12 No. 02
- Dimas & Woyanti, Nenik. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 16 No. 1 32-41
- Edy, I, C. 2009. Analisis Pengaruh Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengangguran di Provinsi Dati I Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal ekonomi bisnis dan perbankan*. Vol 17. No 4.

- Endarwati. 2014. *Analisis pengaruh Investasi, Inflasi, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Perdagangan di Kabupaten Jember*. Skripsi. FEB. Universitas Jember.
- Fattah, Nanang. 2008. Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 1 No. 9
- Feriyanto, N. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Geminastiti, K. 2016. *Ekonomi Pendidikan Lanjutan*. Bandung: Yrama Widya
- Gujarati, Damodar N. 2012. *Dasar-dasar ekonometrika*. Terjemahan buku ke 2. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Gunawan, Beni Teguh & Kurniawati, Ardhian. 2017. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Transisi Individu Dalam Pasar Kerja. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 17. No.01 1-20
- Hartanto, T.B. & Masjkuri, S.U. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. Vol. 02 No. 1. 21-30
- Hasan, M. & Aziz, M. 2018. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: CV Nur Lina.
- Indradewa, G, A. & Suardika, N. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol 4, No 8. Hal : 923-950
- Jhingan, M. L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan (D. Guritno). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Julianto, Dedi & Utari, P. Anisa. 2019. Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu di Sumatera Barat. *Jurnal IKRAITH EKONOMIKA*. Vol. 02 No. 02
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2017. *Pengembangan Usaha dan Daya Saing Jasa Logistik Nasional*. Jakarta. Laporan Publik.
- Kuncoro, H. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Hal : 45-56.
- Kusumowidho, Sisdjiatmo. 2010. *Dasar-Dasar Demografi Edisi 2*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia. Jakarta
- Latri, W. & Henny, R. 2018. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *E-Jurnal Universitas Gadjah Mada*. Vol 1. No 1. Hal : 96-102
- Lavrinovicha, I. Lavrinenko, O. & Treinovskis, J. T. 2015. Influence of Education on Unemployment Rate and Incomes of Residents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 174: 3824 – 3831.
- Lincoln, A. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPM
- Maisaroh, Mamai & Risyanto, Havid. 2018. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EkBis)*. Vol. 01 No. 2 206-221

- Nurmayanti, et.al. 2020. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2011-2018. *Dinamic: Directory Journal of Economic*. Vol. 02 No. 02
- Pramitha, P. & Putu, A. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 5. No 1. ISSN 1907-3275.
- Prasetya, D, D. 2015. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Riil dan PDRB Riil Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Tengah 2009 – 2013. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pujoalwanto, B. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta.
- Purba, Sylvia Diana et.al. 2016. Analisis Dukungan Organisasi, Serikat Pekerja dan Pemerintah dalam Pengaruh Motivasi dan Komitmen terhadap Kualitas Hidup Buruh Perempuan di Jabodetabek. *Journal of Management & Business Review*. Vol. 13. No. 01
- Rahman, et.al. 2016. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 No. 02
- Rompas, G. P. 2013. Liquiditas Solvabilitas dan Rentabilitas terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. *Jurnal EMBA*. 1(3): 253.
- Sandika, R,S. Maulida, Y. & Setiawan, D. 2014. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan. *Fakulty of Economic University Pekanbaru Riau*.
- Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Volume 16. No 1.
- Siburian, V, H. & Woyanti, N. 2013. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Industri Kecil Dan Menengah Pada Furniture Kayu di Kabupaten Jepara). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, P, J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Skousen, Mark. 2009. *Sejarah pemikiran ekonomi sang maestro : teori-teori ekonomi modern*. Penanda Media Group. Jakarta. ISBN: 973-346-418-6
- Sudarsono. 1990. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. LP3S. Jakarta.
- Sulistiawati, R. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia. *Jurnal Eksos*. 8(3) : 195-211
- Soelistyo, N. A. P. dan A. 2018. Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 357–371.
- Sukirno, S. 2003. *Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2005. *Makro Ekonomi Modern Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, S. 2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*. Vol 8. No 3. Hal : 195-211
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan pertama
- Sumarsono, S. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam*. Jilid 1. Jakarta : Erlangga
- Todaro, M, P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga : Edisi kedelapan*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Tradena, D. 2017. Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Aceh: UIN Raden Intan.
- Wahyuni, P. A. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 3. No 8. Hal : 8
- Wahyono, Dodik. 2021. Investasi Daerah dalam Teori Modernisasi. *Journal of Social Community*. Vol. 06 No. 1
- Wihastuti, Latri & Rahamatullah, Henny. 2018. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*. Vol. 01 No.01

LAMPIRAN

Lampiran A. Data Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (PTK), Investasi (INV), Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan (P) dan Upah (U) di Pulau Jawa Tahun 2014-2021

Provinsi	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja	Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendidikan	Upah
Banten	2014	63.84	10929.74	5.51	8.19	1.325
	2015	62.24	14268.7	5.45	8.27	1.6
	2016	63.66	16503.24	5.28	8.37	1.784
	2017	62.32	19408.4	5.75	8.53	3.627601
	2018	62.95	22595.82	5.77	8.62	3.532
	2019	63.83	23323.88	5.26	8.74	3.6723
	2020	64.48	19699.22	-3.39	8.63	3.7872
	2021	63.79	171944.4	4.44	8.92	3.8286
DKI Jakarta	2014	66.61	24124.66	5.91	10.54	2.441
	2015	66.39	20579.86	5.91	10.7	2.7
	2016	66.91	16974.38	5.87	10.88	3.1
	2017	61.97	53695.3	6.2	11.02	4.067567
	2018	62.92	55898.18	6.11	11.05	4.13298
	2019	63.9	67867	5.82	11.06	4.25685
	2020	63.81	58922.92	-2.39	11.13	4.59023
	2021	62.63	56321.22	3.56	11.17	4.6831
Jawa Barat	2014	62.77	27913.7	5.09	7.71	1
	2015	60.34	34307.08	5.05	7.86	1
	2016	60.65	38019.46	5.66	7.95	2.25
	2017	63.34	45590.66	5.33	8.14	3.056995
	2018	62.84	50081.1	5.65	8.15	3.2502
	2019	64.99	57517.6	5.02	8.37	3.310282
	2020	64.53	54329.03	-2.52	8.63	3.40925

	2021	64.95	55891.4 9	3.74	8.91	3.58912
Yogyakarta	2014	71.05	17893.6 7	5.17	8.84	0.9885
	2015	68.38	19369.0 6	4.95	9	0.9885
	2016	71.96	21277.1 4	5.05	9.12	1.602052
	2017	71.52	22591.4	5.26	9.19	2.186446
	2018	73.12	21897.2	6.2	9.32	2.287424
	2019	72.72	23466.8	6.59	9.38	2.375523
	2020	71.12	20673.5 9	-2.68	9.95	2.48921
	2021	73.52	20087.3 1	5.53	10.06	2.59152
Jawa Tengah	2014	69.68	20089.2	5.27	6.93	0.91
	2015	67.86	16601.2 6	5.47	7.03	0.91
	2016	67.15	25513.5 2	5.25	7.15	1.988108
	2017	69.11	23187.5	5.26	7.27	2.1205
	2018	68.81	30796.6 8	5.3	7.35	2.2755
	2019	68.85	22467.1 8	5.36	7.53	2.355
	2020	69.43	24661.5 2	-2.65	7.72	2.4114
	2021	69.58	25692.8 8	3.32	8.03	2.54819
Jawa Timur	2014	68.12	40655.5	5.86	7.05	1
	2015	67.84	39120.5 6	5.44	7.14	1
	2016	66.14	49049	5.57	7.23	1.5
	2017	68.78	47237.8 8	5.46	7.34	2.166151
	2018	69.56	35199.8 6	5.47	7.39	2.467
	2019	69.61	46665.5 2	5.53	7.59	2.672
	2020	70.33	44917.7 4	-2.33	7.81	2.8319
	2021	70	48081.1 9	3.57	8.12	2.9365

Lampiran B. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.577584	4	0.0482

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(I)	-0.112929	-0.088222	0.000079	0.0054
LOG(PE)	0.009273	-0.004900	0.000026	0.0056
LOG(P)	-0.012036	-1.923116	0.501174	0.0069
LOG(U)	0.173226	0.289765	0.002074	0.0105

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PTK)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/17/22 Time: 15:00

Sample: 2014 2021

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.35745	3.062096	4.688766	0.0000
LOG(I)	-0.112929	0.088592	-1.274700	0.2102
LOG(PE)	0.009273	0.029698	0.312250	0.7566
LOG(P)	-0.012036	1.429643	-0.008419	0.9933
LOG(U)	0.173226	0.137686	1.258125	0.2160

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970015	Mean dependent var	13.31917
Adjusted R-squared	0.962913	S.D. dependent var	1.114255
S.E. of regression	0.214584	Akaike info criterion	-0.057183
Sum squared resid	1.749753	Schwarz criterion	0.332651
Log likelihood	11.37239	Hannan-Quinn criter.	0.090136
F-statistic	136.5870	Durbin-Watson stat	1.810358
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.735076	(5,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	101.010050	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PTK)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/17/22 Time: 14:58

Sample: 2014 2021

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.29655	2.580587	8.640108	0.0000
LOG(I)	0.562270	0.184574	3.046316	0.0039
LOG(PE)	-0.070230	0.074057	-0.948333	0.3483
LOG(P)	-6.941390	0.734104	-9.455594	0.0000
LOG(U)	0.242248	0.250384	0.967506	0.3387
R-squared	0.754060	Mean dependent var		13.31917
Adjusted R-squared	0.731182	S.D. dependent var		1.114255
S.E. of regression	0.577715	Akaike info criterion		1.838860
Sum squared resid	14.35144	Schwarz criterion		2.033777
Log likelihood	-39.13264	Hannan-Quinn criter.		1.912519
F-statistic	32.95988	Durbin-Watson stat		0.358163
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran D. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	112.2665 (0.0000)	3.618869 (0.0571)	115.8854 (0.0000)
Honda	10.59559 (0.0000)	-1.902332 --	6.147062 (0.0000)
King-Wu	10.59559 (0.0000)	-1.902332 --	6.864566 (0.0000)
Standardized Honda	13.54289 (0.0000)	-1.520801 --	5.027215 (0.0000)
Standardized King-Wu	13.54289 (0.0000)	-1.520801 --	5.961283 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	112.2665 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Lampiran E. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: LOG(PTK)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/17/22 Time: 14:58
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.35745	3.062096	4.688766	0.0000
LOG(I)	-0.112929	0.088592	-1.274700	0.0102
LOG(PE)	0.009273	0.029698	0.312250	0.7566
LOG(P)	-0.012036	1.429643	-0.008419	0.9933
LOG(U)	0.173226	0.137686	1.258125	0.0260

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970015	Mean dependent var	13.31917
Adjusted R-squared	0.962913	S.D. dependent var	1.114255
S.E. of regression	0.214584	Akaike info criterion	-0.057183
Sum squared resid	1.749753	Schwarz criterion	0.332651
Log likelihood	11.37239	Hannan-Quinn criter.	0.090136
F-statistic	136.5870	Durbin-Watson stat	1.810358
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F. Uji Multikolinieritas

	I	PE	P	U
I	1	0.097445834991	0.140821034631	0.464587766560
PE	0.097445834991	1	0.056355330396	0.266993379714
P	0.140821034631	0.056355330396	1	0.614219158407
U	0.464587766560	0.266993379714	0.614219158407	1

Lampiran G. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/17/22 Time: 15:06
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.235199	0.127726	-1.841437	0.0725
I	-2.43E-07	7.59E-07	-0.319532	0.7509
PE	-0.001115	0.009646	-0.115595	0.9085
P	0.061517	0.016862	3.648230	0.0007
U	-0.054530	0.023554	-2.315145	0.0254

R-squared	0.261612	Mean dependent var	0.144748
Adjusted R-squared	0.192924	S.D. dependent var	0.125821
S.E. of regression	0.113035	Akaike info criterion	-1.423911
Sum squared resid	0.549404	Schwarz criterion	-1.228994
Log likelihood	39.17386	Hannan-Quinn criter.	-1.350252
F-statistic	3.808735	Durbin-Watson stat	2.655797
Prob(F-statistic)	0.009756		

Lampiran H. Uji Normalitas

